

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF  
DI SDN BETET 1 KOTA KEDIRI**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Memperoleh Derajat Gelar S-2**

**Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan**



**Disusun oleh :**

**YUSUF JUNIAR DEWANTARA**

**NIM : 201810240211002**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**Januari 2020**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **YUSUF JUNIAR DEWANTARA**

NIM : **201810240211002**

Program Studi : **Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **TESIS** dengan judul: **EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SDN BETET 1 KOTA KEDIRI**. Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Januari 2020

Yang menyatakan,



**YUSUF JUNIAR DEWANTARA**

# **EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SDN BETET 1 KOTA KEDIRI**

Diajukan oleh :

**YUSUF JUNIAR DEWANTARA**  
**201810240211002**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Senin/ 20 Januari 2020**

Pembimbing Utama

**Dr. Dwi Priyo Utomo, M.Pd.**

Pembimbing Pendamping

**Dr. Estu Widodo, M.Hum.**

Direktur  
Program Pascasarjana



**Prof. Akhsanul In'am, Ph.D**

Ketua Program Studi  
Magister Kebijakan dan  
Pengembangan Pendidikan

**Dr. Agus Tinus, M.Pd**



# TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**YUSUF JUNIAR DEWANTARA**

201810240211002

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Jum'at/ 24 Januari 2020  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Dwi Priyo Utomo

Sekretaris : Dr. Estu Widodo

Penguji I : Dr. Ichsan Anshory AM.

Penguji II : Dr. Agus Tinus

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'alla atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SDN BETET 1 KOTA KEDIRI**. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, satu-satunya suri tauladan kita, pelopor Ilmu Pengetahuan untuk mentadaburi tanda-tanda kekuasaan-Nya.

Selama proses penyusunan hingga selesainya Tesis ini penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, pengarahan, saran dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menyediakan seluruh fasilitas selama perkuliahan;
2. Bapak Dr. Agus Tinus, M.Pd selaku Ketua Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi;
3. Bapak Dr. Dwi Priyo Utomo, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Estu Widodo, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu serta kesempatan untuk membimbing dan memotivasi kami dalam penyusunan Tesis ini;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat serta memberikan pengetahuannya selama perkuliahan untuk memperluas wawasan kami;
5. Kedua Orang Tua serta seluruh keluarga saya yang selalu memberikan dukungan dan tidak lupa selalu mendo'akan kesuksesan untuk saya;
6. Teman-teman se-angkatan di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang khususnya teman-teman MKPP 2018 dan
7. Semua orang sekeliling saya yang selalu memberikan bantuan, dukungan serta memberikan do'a terbaik kepada saya.

Semoga Allah 'Azza wa Jalla memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang selalu memberikan dukungan kepada saya. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, diharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Malang, 20 Januari 2020

Penulis,



**ABSTRAK**

**Dewantara, Juniar Yusuf.** (2020). *Evaluasi Kebijakan Program Pendidikan Inklusif Di SDN Betet 1 Kota Kediri*. Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Dr. Dwi Priyo Utomo (NIDN. 0026026201); (2) Dr. Estu Widodo (NIDN. 0020056801). E-mail: [yjoeniar@gmail.com](mailto:yjoeniar@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program pendidikan inklusif. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu mendeskripsikan dan memaknai data dari masing-masing komponen yang dievaluasi dengan menggunakan model evaluasi *CIPP* (*Context, Input, Process, Product*). Sumber data dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, guru utama, guru pendamping khusus (GPK), komite sekolah, orang tua/wali murid dan siswa ABK. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi dokumen dan dokumentasi. Hasil temuan pada komponen konteks menunjukkan bahwa landasan hukum penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan yang berlaku di Indonesia. Tujuan pendidikan inklusif sudah sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan. Hasil temuan komponen input menunjukkan input ABK yang bersekolah jumlahnya cukup banyak dengan berbagai jenis ketunaannya sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Pendidikan Inklusif. Namun pada komponen SDM terutama GPK dan sarana prasarana masih memerlukan perhatian untuk meningkatkan dan melengkapinya. Hasil temuan komponen proses menunjukkan proses penerimaan siswa, kegiatan belajar mengajar dan penilaian siswa telah menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Namun masih ada siswa yang tidak seharusnya masuk di sekolah inklusif menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Hasil temuan komponen produk menunjukkan terdapat prestasi yang berhasil diraih oleh siswa inklusif dan dampak positif dari pelaksanaan pendidikan inklusif. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pemerintah dan pihak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar tetap melaksanakan program tersebut dan terus berkomunikasi serta berkolaborasi dengan lembaga dan beberapa pihak terkait dalam menjalankan program pendidikan inklusif agar lebih optimal.

**Kata Kunci:** Evaluasi Program, Pendidikan Inklusif, Model *CIPP*

## **ABSTRACT**

**Dewantara, Juniar Yusuf.** (2020). *Evaluation Policy of Inclusive Education Program at SDN Betet 1 Kota Kediri*. Master of Policy and Education Development, University of Muhammadiyah Malang. Supervised by: (1) Dr. Dwi Priyo Utomo (NIDN. 0026026201); (2) Dr. Estu Widodo (NIDN. 0020056801). E-mail: [yjoeniar@gmail.com](mailto:yjoeniar@gmail.com)

*This study aims to evaluate the implementation of inclusive education programs. The method used is a qualitative analysis that is describing and interpreting data from each component evaluated using the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product). Data sources in this study include the principal, principal teacher, special assistant teacher (GPK), school committee, parents of students and special needs students. Data collection is done by interview, observation, document study and documentation. The findings in the context component show that the legal basis for implementing inclusive education is in accordance with the prevailing Education System Law in Indonesia. The objectives of inclusive education are in accordance with the established formula. The findings of the input component show that there are quite a number of ABK inputs in school with a variety of types of disability in accordance with the Inclusive Education Law. However, the SDM component especially GPK and infrastructure still need attention to improve and complete it. The findings of the process component show that the process of student acceptance, teaching and learning activities and student assessment have adjusted to the applicable regulations. But there are still students who are not supposed to go to an inclusive school to study at the school. The findings of the product component indicate that there are achievements achieved by inclusive students and the positive impact of implementing inclusive education. This research provides recommendations for the government and schools implementing inclusive education to continue implementing the program and continue to communicate and collaborate with institutions and several related parties in carrying out inclusive education programs to be more optimal.*

**Key Words:** Program Evaluation, Inclusive Education, CIPP Model

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR SUSUNAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>1. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>2. Kajian Pustaka.....</b>	<b>6</b>
2.1 Evaluasi Program .....	6
2.1.1 Pengertian Evaluasi Program .....	6
2.1.2 Tujuan Evaluasi Program .....	7
2.1.3 Manfaat Evaluasi Program .....	8
2.1.4 Model Evaluasi Program .....	8
2.1.5 Model Evaluasi <i>CIPP</i> .....	10
2.2 Pendidikan Inklusif .....	12
2.2.1 Pengertian Pendidikan Inklusif .....	12
2.2.2 Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.....	13
2.2.3 Faktor-Faktor Pendidikan Inklusif .....	14
<b>3. Metode Penelitian .....</b>	<b>16</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan .....	16
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	17
3.3 Instrumen Penelitian .....	17
3.4 Data dan Sumber Data .....	17
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	17
3.6 Teknik Analisis Data.....	17
3.7 Uji Keabsahan Data.....	18
<b>4. Hasil Penelitian .....</b>	<b>18</b>
4.1 Evaluasi <i>Context</i> Pada Program Pendidikan Inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri .....	18



4.2	Evaluasi <i>Input</i> Pada Program Pendidikan Inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri.....	20
4.3	Evaluasi <i>Process</i> Pada Program Pendidikan Inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri.....	25
4.4	Evaluasi <i>Product</i> Pada Program Pendidikan Inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri.....	27
<b>5.</b>	<b>Pembahasan</b> .....	<b>28</b>
5.1	Evaluasi <i>Context</i> Pada Program Pendidikan Inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri.....	28
5.2	Evaluasi <i>Input</i> Pada Program Pendidikan Inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri.....	30
5.3	Evaluasi <i>Process</i> Pada Program Pendidikan Inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri.....	32
5.4	Evaluasi <i>Product</i> Pada Program Pendidikan Inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri.....	33
<b>6.</b>	<b>Kesimpulan dan Saran</b> .....	<b>34</b>
<b>7.</b>	<b>Rujukan</b> .....	<b>36</b>
<b>8.</b>	<b>Lampiran</b> .....	<b>39</b>

## 1. Pendahuluan

Evaluasi menjadi sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam mengukur kesuksesan atau kelayakan suatu program ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam hal ini yaitu pemerintah (Akbar & Mohi, 2018). Dalam pengertian lain, evaluasi kebijakan merupakan sebuah kegiatan yang didesain untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang berbeda secara khusus dalam hal kesesuaian dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta memberikan dampak nyata terhadap khalayak sesuai dengan yang diinginkan.

Evaluasi nantinya dapat membantu dalam menentukan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan serta memberikan informasi yang sesuai tentang ketercapaian tujuan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, akan tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah (Dunn, 2003).

Studi mengenai evaluasi kebijakan memiliki peranan penting, karena hasil dari evaluasi dapat dijadikan sebagai acuan penentu apakah program ataupun kebijakan dapat diteruskan atau tidak diteruskan. Beberapa studi evaluasi kebijakan telah banyak dilakukan oleh para peneliti maupun akademisi dengan tujuan untuk mengukur keberhasilan sebuah program atau kebijakan, dengan menggunakan berbagai pendekatan, teori maupun model evaluasi. Oleh karena itu, wajar mengingat banyaknya program dan kebijakan baru muncul pada sebuah pemerintahan baik dalam pemerintahan pusat, provinsi, kota, kabupaten maupun daerah salah satunya adalah kebijakan pendidikan inklusif di Kota Kediri.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 19 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri pada tahun 2017 telah menyelenggarakan

kebijakan pendidikan inklusif pada tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama. Melalui Dinas Pendidikan Kota Kediri, dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif ini menunjuk delapan Sekolah Dasar Negeri dan tiga Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai sekolah inklusif di Kota Kediri salah satunya ialah SDN Betet 1 Kota Kediri.

Pendidikan inklusif merupakan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki keterbatasan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif memiliki tujuan yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Dengan mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif, Pemerintah Kota Kediri ingin mewujudkan kesetaraan hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan dan berusaha untuk menghapus stigma negatif masyarakat mengenai pendidikan sekolah untuk para peserta didik penyandang disabilitas yang harus dibedakan ruang pendidikannya. Dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 telah tercantum bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, serta Ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Lebih dari itu, Dirjen Manajemen Pendidikan telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Nomor 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 yang berisi setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, SMK. Pemerintah Kota Kediri hingga saat ini terus melakukan upaya untuk melengkapi fasilitas sekolah sesuai yang tercantum pada Surat Edaran tersebut. Pada tahun 2019, direncanakan Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendidikan Kota Kediri akan menunjuk salah satu Sekolah

Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri menjadi sekolah inklusif.

Sekolah hendaknya memiliki kesiapan dalam melaksanakan pendidikan inklusif, terlebih pada sekolah yang sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman atau latar belakang sebagai sekolah inklusif. Ada beberapa indikator yang setidaknya wajib dimiliki oleh sekolah yang melaksanakan program pendidikan inklusif yaitu indikator kelembagaan, kurikulum dan pembelajaran, ketenagaan, kesiswaan, sarana prasarana, dan pembiayaan (Wartomo, 2016). Lebih lengkap lagi, terdapat sembilan dimensi implementasi pendidikan inklusif yang patut dipertimbangkan oleh setiap satuan pendidikan yaitu: 1) dimensi kelembagaan; 2) dimensi kurikulum; 3) pembelajaran; 4) penilaian; 5) dimensi kesiswaan; 6) dimensi SDM; 7) dimensi sarana dan prasarana; 8) dimensi peran serta masyarakat; 9) dimensi pembiayaan (Yusuf et al, 2017).

SDN Betet 1 memiliki latar belakang Sekolah Dasar reguler yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Ketika sebuah lembaga melewati tahap peralihan alih fungsi, pasti akan menjumpai berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu permasalahan yang dijumpai dan menjadi sebuah kebutuhan mutlak harus dimiliki oleh sebuah sekolah inklusif adalah Guru Pendamping Khusus atau biasa yang disebut dengan GPK. Guru Pendamping Khusus adalah guru yang dipersiapkan untuk mendampingi dan membimbing peserta didik yang berkebutuhan khusus selama proses belajar mengajar dalam kelas. Tidak semua guru dapat dijadikan GPK, karena GPK dilatih dan dididik secara khusus serta dipersiapkan untuk peserta didik yang secara khusus pula membutuhkan guru tersebut seperti peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus. Jika guru pada umumnya dijadikan guru pendamping khusus, akan terjadi ketidak profesionalan dalam menangani para peserta didik inklusif. Salah satu hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa kebanyakan permasalahan pendidikan inklusif terjadi pada hubungan dan komunikasi dengan teman sebayanya dan dengan para guru (Kovacevic & Petrovic, 2011)

Berdasarkan penelitian dinyatakan bahwa guru memberikan peran yang sangat vital dalam pendidikan inklusif, mereka harus berinteraksi dan bermain secara langsung dengan siswa (Halder & Das, 2018). Selain permasalahan terhadap guru, ditemukan pula permasalahan pada kurikulum pembelajaran pada penyelenggaraan pendidikan inklusif. Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, telah dipaparkan bahwa



kurikulum yang sudah ada saat ini harus menyesuaikan kepada para peserta didik inklusif. Jika kurikulum terjadi penyesuaian atau terjadi perubahan, begitu pula komponen pendidikan pendukung lain seperti bahan ajar, media belajar, sistem penilaian pembelajaran, sistem penerimaan peserta didik sarana dan prasarana pasti juga akan mengalami perubahan.

Seorang psikolog sebaiknya disediakan oleh sekolah guna untuk memberikan penilaian terhadap aspek-aspek siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kategori dan kriteria apakah siswa mampu mengikuti pendidikan inklusif di sekolahnya. Sistem penilaian yang biasa digunakan dalam kenaikan kelas peserta didik inklusif berbeda dengan sistem penilaian peserta didik reguler yaitu didasarkan pada ketercapaian kecakapan mental (Sukinah, 2013). Hal inilah yang terkadang tidak diketahui oleh beberapa guru pengajar di sekolah inklusif. Ketidaktahuannya itu dapat menimbulkan permasalahan karena sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif memiliki format penilaian terhadap peserta didiknya sesuai dengan pemahaman mereka sendiri (Sukinah, 2013). Kasus ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan tentang sistem penilaian pada pendidikan inklusif dikalangan guru pengajar sekolah.

Kemudian untuk mewujudkan atau melengkapi aspek-aspek pada sekolah inklusif tersebut pasti dibutuhkan biaya dan persiapan dari pemerintah dalam mendukung hal tersebut. Seperti yang tercantum pada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 6 yaitu pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik, pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk, pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Dalam penyelenggaraan kebijakan atau program pendidikan inklusif masih terdapat beberapa permasalahan. Subroto (2012) dalam penelitiannya menemukan beberapa aspek dalam penerapan pendidikan inklusif di sekolah tersebut yaitu *input*, proses dan *output*. *Input*: menunjukkan enam aspek yakni sistem penerimaan siswa, persyaratan administrasi guru, kurikulum, kalender pendidikan, sarana prasarana, dan pembiayaan telah memenuhi standar objektif walaupun masih terdapat beberapa sub aspek yang masih perlu perbaikan; proses: terdapat dua aspek yaitu pembelajaran dan pengelolaan kelas yang diamati menunjukkan hanya pada aspek pembelajaran dengan sub aspek kurikuler dan ekstrakurikuler yang masih perlu perbaikan; *output*/hasil:

karena masih merupakan sekolah rintisan inklusif yang dievaluasi adalah hasil belajar siswa dan sudah masuk dalam standar objektif. Temuan dari penelitian ini berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan inklusif pada aspek dan sub aspek yang masih masuk dalam kategori rendah dan menengah dari tahapan evaluasi yang dilakukan.

Selanjutnya, pada penelitian evaluasi yang dilakukan oleh Lestari (2017) menemukan bahwa pada pendidikan inklusif di MAN Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta masih menemui kendala-kendala dalam beberapa aspek. Pertama, aspek pendidik dan tenaga pendidik yaitu: kinerja GPK belum maksimal dan ketidakmampuan guru dalam menyampaikan materi pelajaran ke ABK. Kedua, aspek sarana prasarana dan pembiayaan yaitu: belum mampu membeli printer braille karena keterbatasan dana. Ketiga, aspek pembinaan dan pengawasan yaitu: pembinaan hanya fokus pada GPK dan pengawasan bersifat formal. Keempat, aspek kerja sama yaitu: belum menjalin kerja sama dengan psikolog atau terapis. Kelima, aspek peserta didik yaitu: masih ada ABK yang mengalami kesulitan belajar saat berada di asrama.

Pada hasil penelitian evaluasi yang dilakukan oleh Arlina (2016) disebutkan bahwa aspek input telah memenuhi standar dari segi peserta didik, namun aspek kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan pendanaan belum memenuhi standar. Pada aspek proses yaitu perencanaan dan pelaksanaan, penerapan prinsip pembelajaran inklusif masih belum optimal. Pada aspek output, pencapaian keberhasilan pembelajaran masih kurang dan penilaian pembelajaran dan sertifikat disamakan dengan siswa reguler.

Untuk peningkatan mutu pendidikan yang baik diperlukan sebuah sistem manajemen pendidikan yang efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan dari pelaksanaan program pendidikan inklusif. Oleh karena itu, evaluasi diperlukan dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri. Evaluasi dalam ruang lingkup pendidikan ditinjau dari sarasannya dibedakan menjadi dua macam, yaitu evaluasi yang bersifat makro dan evaluasi yang bersifat mikro. Evaluasi yang bersifat makro ialah bersasaran pada program pendidikan secara umum, yaitu program yang direncanakan untuk memperbaiki bidang pendidikan. Sedangkan evaluasi yang bersifat mikro ialah evaluasi yang sering digunakan pada tingkat kelas. Sasaran evaluasi yang bersifat mikro ialah program pembelajaran di kelas dan yang menjadi pelaku serta

penanggung jawab dari kegiatan evaluasi tersebut adalah guru untuk sekolah atau dosen untuk perguruan tinggi (Mardapi, 2000).

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif yang telah terimplementasi dengan mengevaluasi program pendidikan inklusif yang diselenggarakan di SDN Betet 1 Kota Kediri. Sekolah tersebut dipilih karena memiliki predikat sebagai penerima siswa inklusif terbanyak se-Jawa Timur. Kepala sekolah yang menjabat saat ini adalah penggagas gerakan inklusif di Kota Kediri. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif di SDN Betet 1 sempat menemui beberapa kendala yakni pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi peserta didik berkebutuhan khusus, pengadaan GPK yang profesional dan masalah pembiayaan.

Berangkat dari pendahuluan tersebut, maka penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi pelaksanaan program yaitu pada efektivitas pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri. Agar mendapatkan visualisasi dari pelaksanaan program secara menyeluruh dan mendalam penelitian ini menggunakan model evaluasi program *CIPP (Context, Input, Process, Product)*. Adapun rumusan permasalahan terkait dengan evaluasi ini adalah: Bagaimana evaluasi *Context, Input, Process, Product* pada program pendidikan inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri?

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1 Evaluasi Program**

#### **2.1.1 Pengertian Evaluasi Program**

Secara umum evaluasi merupakan sebuah kegiatan yang diawali dengan mengukur dan menilai (Arikunto, 2012). Evaluasi merupakan alat untuk menganalisis, menilai fenomena dan aplikasi ilmu pengetahuan serta juga dapat dimanfaatkan untuk mengambil sebuah keputusan secara menyeluruh yang berkaitan dengan *input, process* dan *output* (Nurbiyati, 2015; Hariyono, 2015). Sejauh mana keefektifan sebuah kebijakan atau program serta tujuan dari sebuah program tersebut dapat dicapai dinilai dari evaluasi yang dilakukan guna dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang.

Menurut Anderson dalam Winarno (2007), evaluasi adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi

dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Suchman memandang evaluasi sebagai proses penentuan hasil yang dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan (Arikunto et al, 2009). Alternative keputusan yang ditentukan oleh para pengambil keputusan diambil dari informasi dan gambaran proses yang berasal dari kegiatan evaluasi (Stufflebeam et al, 2002).

Arikunto et al (2009) menjelaskan bahwa pengertian program secara umum adalah sebuah rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang pada waktu yang akan datang. Sedangkan pengertian program secara khusus yang terkait dengan evaluasi adalah sebuah kesatuan atau rangkaian kegiatan yang merupakan implementasi atau realisasi dari sebuah kebijakan yang terjadi dalam proses saling terkait satu sama lain di dalam sebuah organisasi yang melibatkan beberapa individu.

Program yang telah terlaksana bahkan yang sedang berjalan sebaiknya berakhir dengan sebuah kegiatan evaluasi agar dapat diketahui apakah program tersebut pelaksanaannya berhasil dan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan atau tidak (Isaac & Michael, 1984). Isaac & Michael (1984) menjelaskan terdapat tiga tahap rangkaian evaluasi program yaitu: (1) Merancang pertanyaan yang spesifik untuk memperoleh informasi-informasi atau data; (2) Menggali data atau informasi yang relevan terkait dengan penelitian dan (3) Memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak pengambil keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan program tersebut.

Evaluasi program adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi level keberhasilan dari sebuah kegiatan yang telah direncanakan. Menurut Tyler evaluasi program merupakan proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terrealisasikan (Arikunto et al, 2009). Selanjutnya evaluasi program dapat dikatakan sebagai sebuah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan (Stufflebeam et al, 2002).

### **2.1.2 Tujuan Evaluasi Program**



Menurut Mulyatiningsih (2011), evaluasi program dilakukan bertujuan untuk: 1) Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi, hasil evaluasi ini penting untuk pengembangan program yang sama di tempat lain; 2) Mengambil keputusan mengenai keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan. Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mengetahui sesuatu kondisi, maka evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitian evaluatif. Menurut Arikunto (2012) tujuan dari evaluasi program ada dua yaitu tujuan umum yang mengarah pada program secara keseluruhan dan tujuan khusus yang berfokus pada setiap aspek dari program tersebut.

### **2.1.3 Manfaat Evaluasi Program**

Berdasarkan pemaparan Arikunto (2012) terdapat empat kebijakan yang kemungkinan dapat dilaksanakan berdasarkan hasil dari pelaksanaan sebuah program keputusan yakni: (a) Menghentikan program, disebabkan karena program tersebut dianggap kurang *benefit* atau tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan untuk kedepannya; (b) Merevisi program, disebabkan karena terdapat sedikit kesalahan pada bagian-bagian tertentu dari program yang kurang sesuai dengan harapan kedepannya; (c) Melanjutkan program, disebabkan karena program tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana dan harapan serta memberi dampak *benefit* yang baik atau bermanfaat untuk kedepannya; (d) Desimilasi yaitu sebuah kegiatan untuk melaksanakan program dan menyebarkannya di lembaga atau satuan pendidikan lain, melaksanakannya berulang kali di waktu lain. Keputusan untuk melakukan desimilasi disebabkan karena program tersebut telah sukses/berhasil terlaksana dengan baik. Wujud dari hasil evaluasi program adalah sebuah rekomendasi dari peneliti yang sangat berguna bagi para *decision maker* untuk penentuan pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari sebuah program. Masukan dari hasil evaluasi program tersebut sebagai bahan para pengambil keputusan untuk menilai dan menentukan lanjut tidaknya sebuah program yang sedang berjalan atau telah dilaksanakan.

### **2.1.4 Model Evaluasi Program**

Terdapat delapan model evaluasi program menurut Kaufan dan Thomas dalam Arikunto (2012) yaitu:

#### **1. Goal Oriented Evaluation Model**

Objek yang diamati pada model ini adalah tujuan program. Untuk mengetahui pencapaian pelaksanaan program, evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus-menerus.

## *2. Goal Free Evaluation Model*

Model evaluasi ini memperhatikan bagaimana terlaksananya program dan mencatat hal positif maupun negatif dari evaluasi tersebut.

## *3. Formatif Summatif Evaluation Model*

Model evaluasi sumatif dilaksanakan ketika program sudah selesai dilaksanakan, sedangkan model evaluasi formatif dilaksanakan ketika program masih berlangsung.

## *4. Countenance Evaluation Model*

Model evaluasi ini digunakan oleh evaluator untuk mempertimbangkan program dengan cara membandingkan hasil evaluasi program satu dengan yang terjadi pada program lain dengan objek sasaran yang sama dan membandingkan hasil pelaksanaan program dengan standar yang telah ditentukan oleh program tersebut.

## *5. Responsif Evaluation Model*

Pada model evaluasi ini pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif-naturalistik. Makna evaluasi pada model ini tidak diartikan sebagai pengukuran, melainkan pemberian makna atau melukiskan sebuah realitas dari berbagai perspektif orang-orang yang terlibat, berminat dan berkepentingan dengan program.

## *6. Discrepancy Model*

Model ini untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi pada setiap komponen program dengan maksud untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang ditentukan pada program dengan kondisi aktual dari program tersebut.

## *7. CSE-UCLA Evaluation Model*

Terdapat empat tahapan dalam model evaluasi ini yaitu: a) *Needs assessment*, berfokus pada penentuan masalah yang perlu dipertimbangkan pada program, kebutuhan anggaran program dan tujuan yang dicapai program; b) *Program planning*, mengevaluasi perencanaan program guna untuk mengetahui program yang disusun telah sesuai dengan analisis kebutuhan atau tidak; c) *Formative evaluation*, evaluasi yang

dilakukan ketika program sedang berlangsung; d) *Summative evaluation*, evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui hasil, dampak dan ketercapaian dari program.

#### 8. *CIPP Evaluation Model*

Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) merupakan model evaluasi dimana evaluasi dilakukan secara keseluruhan sebagai suatu sistem. Model ini merupakan konsep yang ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting dari evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki.

##### 2.1.5 Model Evaluasi CIPP

Model CIPP berorientasi kepada suatu keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*). Tujuannya adalah untuk membantu administrator (kepala sekolah dan guru) di dalam membuat keputusan. Evaluasi diartikan sebagai suatu proses mendeskripsikan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan (Stufflebeam et al, 2002). Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, manajemen, perusahaan, dan sebagainya serta dalam berbagai jenjang baik itu proyek, program, maupun institusi (Widyodoko, 2009). Dalam bidang pendidikan digolongkan atas empat dimensi yaitu *context, input, process*, dan *product*, sehingga disebut evaluasi CIPP.

Stufflebeam (2002) menjelaskan bahwa terdapat beberapa komponen dari masing-masing jenis evaluasi pada model evaluasi program CIPP yakni sebagai berikut.

##### 1. *Context Evaluation*

Untuk menentukan hasil pada sebuah program, evaluasi konteks menilai beberapa aspek yang berguna sebagai dasar dalam menentukan tujuan dan prioritas yakni menilai kebutuhan, masalah dan kesempatan. Utamanya evaluasi konteks bertujuan untuk menganalisis *strength and weakness* sebuah program. Seorang evaluator akan lebih leluasa dalam memberikan arahan untuk perbaikan yang diperlukan terhadap sebuah program jika terlebih dahulu telah mengetahui kedua hal tersebut. Evaluasi konteks dapat digunakan sebagai sebuah upaya untuk merepresentasikan dan merinci kebutuhan dan tujuan dari program yang belum terpenuhi.

##### 2. *Input Evaluation*

Evaluasi masukan memberikan penilaian terhadap pendekatan-pendekatan lain yang dapat digunakan sebagai alat untuk merancang sebuah program dan sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Evaluasi masukan sangat membantu untuk mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, rencana dan strategi apa untuk mencapai tujuan, serta bagaimana prosedur kerjanya untuk mencapai tujuan yang mencakup beberapa komponen yaitu: Sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran/dana serta berbagai prosedur dan aturan yang berkaitan dengan program tersebut.

### 3. *Process Evaluation*

Evaluasi proses memberikan penilaian terhadap kerangka kerja sebuah program pada saat implementasi yang nantinya dapat membantu memberikan penjelasan dari dampak program tersebut kepada pihak-pihak terkait. Evaluasi proses dapat digunakan untuk menyediakan informasi yang berguna sebagai rekaman/arsip dari prosedur yang telah terjadi dari proses mendeteksi atau memprediksi sebuah rancangan prosedur dan rancangan implementasi selama tahap penerapan/implementasi yang meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktek pelaksanaan program tersebut. Pada dasarnya evaluasi proses berfungsi untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki serta dapat memiliki kegunaan yang mengarah pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program, apakah sudah terlaksana sesuai dengan rencana atau belum.

### 4. *Product Evaluation*

Seorang *administrator*, *decision maker*, atau pimpinan program bahkan seorang guru dalam menentukan atau membuat sebuah keputusan yang berkaitan dengan suatu upaya lanjutan, akhir, maupun modifikasi sebuah program dapat melalui evaluasi produk. Evaluasi produk berguna untuk membantu para *decision maker* membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun yang belum tercapai serta apa yang dilakukan setelah program itu terselenggara. Ketercapaian/keberhasilan sebuah program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat dilihat dan dinilai melalui evaluasi produk.



Penelitian ini menggunakan model evaluasi *CIPP* yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri karena menurut Mahmudi (2011) pada setiap komponen dari *CIPP* terkait dengan pengambilan sebuah keputusan yang menyangkut pada perencanaan dan operasional sebuah program serta model *CIPP* memiliki keunggulan yaitu memberikan sebuah format evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan komponen evaluasi tersebut. Owen (1993) mengatakan bahwa model evaluasi *CIPP* menggunakan *management oriented evaluation approach* atau bisa disebut juga *evaluation in program management*. Madaus et al (1983) menyebutkan model evaluasi *CIPP* memiliki tujuan yaitu bukan untuk membuktikan (*to prove*), akan tetapi untuk meningkatkan (*to improve*). Maka, model tersebut dapat dikategorikan sebagai model evaluasi yang berorientasi pada peningkatan program (*improvement oriented evaluation*) atau bentuk evaluasi pengembangan program (*evaluation for development*) (Stufflebeam & Shinkfield 1986; Owen, 1993). Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model evaluasi *CIPP* bertujuan untuk mendukung pengembangan sebuah program, membantu pemimpin dan para staf sebuah organisasi dalam mendapatkan serta menggunakan saran/masukan secara sistematis agar kebutuhan-kebutuhan penting dapat terpenuhi atau setidaknya dapat bekerja dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.

## **2.2 Pendidikan Inklusif**

### **2.2.1 Pengertian Pendidikan Inklusif**

Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan manusia yang mampu menjamin keberlangsungan hidup, kesejahteraan dan martabat seseorang. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban bagi negara melalui pemerintahannya untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali termasuk beberapa dari mereka yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan baik secara fisik maupun psikis. Abdullah (2013) mengatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan yang mengacu pada peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh, yang diharapkan mampu menjamin terwujudnya strategi nasional tentang “Pendidikan Untuk Semua” dapat dimiliki oleh semua kalangan serta tidak membedakan ataupun diskriminasi apakah mereka dari golongan masyarakat berkebutuhan khusus atau tidak.

Pendidikan inklusif memiliki sebuah konsep yaitu membaurkan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal yang sebaya di dalam satu kelas pada saat pelayanan pendidikan atau kegiatan belajar mengajar berlangsung dan mengutamakan masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan lingkungan sekolah tersebut. Pendidikan inklusif memiliki semangat tujuan yaitu terselenggaranya sebuah layanan pendidikan yang memberikan kesempatan serta akses seluas-luasnya kepada seluruh anak dalam memperoleh hak atas pendidikan yang layak, berkualitas, tanpa diskriminasi dan sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Menurut Ro'fah & Andayani (2010) dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, pihak sekolah dituntut untuk melakukan penyesuaian dari segi kurikulum, fasilitas sekolah, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran terhadap kebutuhan setiap peserta didik.

Pendidikan inklusif merupakan sebuah layanan pendidikan khusus yang berdasarkan keunikan dan karakteristik setiap individu, sebuah layanan pendidikan yang menyediakan dan memberikan kesempatan untuk semua peserta didik berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah umum bersama dengan anak-anak normal lainnya, sebuah upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah bagi semua peserta didik serta sebuah wadah bagi para peserta didik untuk mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhannya (Sulistiyadi, 2014; Nurharjadmomo & Negara, 2017; Tahir, 2011).

Pendidikan inklusif merupakan sebuah program yang bertujuan untuk memenuhi hak asasi manusia terhadap pendidikan yang tanpa adanya diskriminasi dengan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada semua peserta didik tanpa pengecualian sehingga semua peserta didik mendapat kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam lingkungan yang sama. Pendidikan inklusif juga bertujuan untuk membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar serta membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah pada seluruh warga negara (Depdiknas, 2010).

### **2.2.2 Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif**

Menurut Pendidikan (2010) terdapat tiga prinsip tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif yakni sebagai berikut:

1. Sekolah yang memiliki lingkungan ramah anak dan menghargai perbedaan dari setiap peserta didik yang berkebutuhan khusus.

2. Tersedianya kebutuhan para peserta didik untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui cara: a) Memberi perhatian pada perbedaan kondisi setiap peserta didik; b) Menggunakan kurikulum yang *flexible* mudah dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan para peserta didik; c) Menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang inovatif serta bervariasi; d) Memanfaatkan sumber belajar yang berbasis pada lingkungan sekitar; e) Melakukan kolaborasi antar pihak terkait guna mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif.
3. Mengembangkan potensi para peserta didik secara optimal melalui prinsip pembelajaran untuk ABK yaitu: a) Pengenalan diri; b) Optimalisasi potensi; c) Latihan kemandirian.

### 2.2.3 Faktor-Faktor Pendidikan Inklusif

Hidayat (2014) memaparkan bahwa kualitas pendidikan terutama pada kualitas proses belajar mengajar mampu mempengaruhi kualitas lulusan sedangkan pada kualitas proses belajar mengajar ditentukan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu dengan lainnya yaitu:

#### 1. Input Siswa

Pengelolaan peserta didik yang mencakup: a) Penerimaan peserta didik baru yang meliputi aspek identifikasi, asesmen dan penempatan peserta didik; b) Program bimbingan dan konseling; c) Pengelompokan belajar peserta didik; d) Absensi kehadiran peserta didik; e) Mutasi perpindahan peserta didik; f) Papan statistik peserta didik yang menggambarkan secara menyeluruh tentang basis data para peserta didik; g) Buku induk peserta didik.

Penerimaan peserta didik baru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sebaiknya: a) Kuota minimal dalam satu rombongan belajar yaitu satu peserta didik berkebutuhan khusus; b) Prioritas diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; c) Apabila pendaftar lebih dari yang dibutuhkan, keputusan diserahkan pada kebijakan sekolah penyelenggara; d) Penerimaan peserta didik mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah (Pendidikan, 2010).

#### 2. Kurikulum

Menurut Widyaiswara (2014) kurikulum pada pendidikan inklusif disusun berdasarkan kebutuhan khusus para peserta didik yang diperoleh dari data profil setiap peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus. Manajemen kurikulum pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dimulai dari Kurikulum Berkebutuhan Khusus > Guru Pendamping Khusus > Kegiatan Pembelajaran Kelas Inklusif.

### 3. Guru Pendamping (*Shadow Teacher*)

Menurut Horstman (2012) *Shadow Teacher* adalah seorang guru pendamping di bidang pendidikan sekolah dasar atau pendidikan luar biasa yang langsung turun lapangan dalam menangani siswa yang berkebutuhan khusus selama menempuh pendidikan di sekolah. Rudyati (2005) mengatakan bahwa *Shadow Teacher* merupakan guru dalam pendidikan inklusif yang memberikan layanan pendidikan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus selama menempuh pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan khusus/luar biasa.

### 4. Perencanaan Kegiatan Pembelajaran

Berikut ini beberapa poin yang harus diperhatikan dalam merancang kegiatan pembelajaran pada pendidikan inklusif di satuan pendidikan yaitu: a) Menetapkan tujuan pembelajaran; b) Merencanakan pengelolaan kelas; c) Merencanakan pengelolaan bahan ajar; d) Merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran; e) Merencanakan penggunaan sumber belajar; f) Merencanakan penilaian.

### 5. Proses Belajar Mengajar

Proses belajar mengajar (PBM) atau kegiatan belajar mengajar (KBM) pada pendidikan inklusif pada umumnya dilaksanakan oleh guru kelas, guru utama atau guru mata pelajaran yang dibantu oleh guru pendamping khusus (GPK) dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik dan menyesuaikan dengan keragaman gaya belajar dari para peserta didik. Sedikit ada modifikasi pada penerapan proses pembelajaran sebagai penyesuaian kepada para peserta didik di kelas inklusif yaitu sebagai berikut: 1) Perpanjangan waktu belajar; 2) Pelaksanaan proses pembelajaran sewaktu-waktu dilaksanakan di kelas khusus; 3) Dalam proses pembelajaran menggunakan alat bantu khusus; 4) Mengatur tempat duduk para peserta didik inklusif agar dekat dengan guru; 5) Memanfaatkan para peserta didik yang normal/reguler sebagai tutor untuk membantu temannya pada proses pembelajaran; 6)



Memberikan tugas khusus yang berbeda sesuai dengan kemampuan peserta didik; 7) Memberikan pembelajaran berupa penjelasan khusus di luar jam belajar mengajar.

#### 6. Pengelolaan dalam Pembelajaran

Pengelolaan pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Ali et al (2013) proses pembelajaran berada dalam empat variabel interaksi yaitu: a) *Presage variabel* yang berupa tenaga pendidik; b) *Context variable* yang berupa peserta didik; c) *Process variable* yang berupa pembelajaran; d) *Product variabel* yang berupa perkembangan peserta didik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

#### 7. Sarana dan Prasarana

Suryobroto (2004) menjelaskan bahwa sarana dan prasarana mencakup peralatan, perlengkapan, media ajar dan fasilitas yang dipergunakan dan diperlukan dalam menunjang proses pendidikan di sekolah. Menurut Arikunto (2009) bangunan dan alat perabot sekolah merupakan prasarana sekolah yang berperan dalam proses belajar mengajar walaupun secara tidak langsung. Pada sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif, sarana dan prasarana tersebut tidak hanya digunakan oleh siswa normal/reguler melainkan siswa inklusif dan siswa berkebutuhan khusus yang lebih membutuhkan sarana prasarana yang sesuai dengan jenis ketunaan serta kebutuhan siswa tersebut.

#### 8. Sumber Pembiayaan

Pembiayaan merupakan faktor utama yang menunjang seluruh operasional pendidikan di sebuah sekolah. dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif perlu adanya alokasi dana khusus untuk beberapa keperluan yaitu: 1) Kegiatan identifikasi input siswa; 2) Modifikasi kurikulum; 3) Honor para GTK; 4) Pengadaan sarana dan prasarana; 5) Pemberdayaan peran serta masyarakat/orang tua wali murid; 6) Pengembangan kompetensi guru; 7) Pelaksanaan KBM (Suryobroto, 2004).

#### 9. Pemantauan dan Evaluasi

Pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan, pemantauan/*monitoring* dapat dilaksanakan dengan berkolaborasi atau bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, perguruan tinggi LPTK PK/LB, SLB, rumah sakit, psikolog serta bantuan dan dukungan dari lembaga-lembaga terkait lainnya yang berkompeten mengenai pendidikan inklusif. Pada saat mengelola sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif perlu dilakukan evaluasi agar dapat mengetahui

berbagai macam aspek yang mampu mempengaruhi proses berjalannya program apakah telah sesuai dengan tujuan, prosedur dan menghasilkan *outcome* dengan baik Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: 1) Menentukan keberhasilan dengan menetapkan indikator-indikator sebagai tolok ukur; 2) Menyusun instrumen evaluasi; 3) Indikator yang telah tercapai dilakukan rekaman atau pencatatan sebagai data arsip.

### **3. Metode Penelitian**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Alasan mengapa pendekatan ini digunakan adalah peneliti ingin memahami situasi sosial secara menyeluruh dan mendalam serta menemukan pola, hipotesis dan teori. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian evaluasi deskriptif, agar peneliti mampu memeriksa proses tahapan sebuah program sekaligus memaparkan berbagai fakta temuan yang bersifat kompleks yang terdapat pada program tersebut. Model evaluasi program yang digunakan untuk penelitian ini telah dikembangkan oleh Stufflebeam yaitu model evaluasi program pendidikan yang bersifat komprehensif yang mencakup *Context, Input, Process, Product* atau biasa disebut dengan *CIPP* (Stufflebeam et al, 2002).

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September tahun 2019 di SDN Betet 1 yang beralamatkan di Jl. Lapangan, RT/RW 15/7, Ds. Betet, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur. Sekolah tersebut dipilih oleh peneliti karena telah memperoleh prestasi tingkat provinsi yaitu menerima siswa inklusif terbanyak se-Jawa Timur serta sekolah tersebut menjadi acuan untuk pengembangan sekolah pendidikan inklusif di Kota Kediri pada tingkat Sekolah Dasar.

#### **3.3 Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama dengan menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi dan studi dokumen yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program serta alat pendukung sebagai perekam hasil wawancara.

#### **3.4 Data dan Sumber Data**

Jenis data yang diperoleh dan dianalisis ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang ditentukan langsung oleh peneliti diantaranya: Kepala sekolah, guru pendamping khusus (GPK), guru utama, komite sekolah, siswa dan orang tua siswa ABK. Untuk data sekunder diperoleh dari hasil studi dokumen, dokumentasi dan observasi. Peneliti menggunakan teknik *purposive snowball sampling* pada penentuan subjek penelitian.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti memperoleh informasi dari informan atau subjek penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi non partisipan, wawancara mendalam dan studi dokumen.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu *data reduction, data display and conclusion drawing/verification* (Miles & Huberman, 1994).

### **3.7 Uji Keabsahan Data**

Untuk memperoleh kredibilitas, pada penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi yang berfungsi untuk menguji kredibilitas data dari sumber sumber data. Teknik triangulasi yang digunakan ialah: 1) triangulasi teknik yaitu membandingkan perolehan data dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumen serta dokumentasi; dan 2) triangulasi sumber yaitu membandingkan perolehan data dari hasil wawancara dengan informan lain yang berbeda untuk meminimalisir subjektivitas.

## **4. Hasil Penelitian**

### **4.1 Evaluasi *Context* Pada Program Pendidikan Inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri**

Evaluasi *context* pada pelaksanaan program pendidikan inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri mencakup beberapa komponen yakni: latar belakang historis, tujuan pendidikan inklusif serta kebijakan dan peraturan acuan yang berlaku. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber kepala sekolah dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, latar belakang historis sekolah dalam melaksanakan kebijakan program pendidikan inklusif adalah berawal dari ketertarikan beliau tentang pendidikan inklusif.

“Sekitar dua tahun sebelum 2010, terdapat dua orang guru yang berkesempatan kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang di jurusan S1 PGSD. Setelah menyelesaikan studinya, mereka kembali bertugas di SDN Betet 1 dengan membawa ilmu yang telah mereka pelajari salah satunya tentang pendidikan inklusif. Lalu saya mempelajari buku materi tentang pendidikan inklusif tersebut.” (KS, 29/07/2019).

Bapak kepala sekolah mengatakan selama ia menjadi guru hingga kepala sekolah, pasti terdapat siswa yang lamban belajar, disabilitas, keterbatasan fisik namun otaknya cerdas dan ada pula yang sebaliknya. Maka beliau memberikan usulan kepada Dinas Pendidikan Kota Kediri agar setiap gugus diadakan sekolah inklusif.

“Saya selama menjadi guru dulu berpikiran gini Mas, pasti ada anak disetiap sekolah yang lamban belajar, disabilitas, ada yang fisiknya terbatas tapi *pinter* dan sebaliknya, maka saya mengusulkan di setiap gugus ada sekolah inklusif agar anak-anak bisa bersekolah dengan layak” (KS, 29/07/2019).

Karena seringnya beliau mendiskusikan dengan para *stakeholder* tentang pendidikan inklusif, maka pada tahun 2010 Dinas Pendidikan melakukan penunjukkan kepada beberapa sekolah untuk melaksanakan kebijakan program pendidikan inklusif, salah satunya yaitu SDN Betet 1 Kota Kediri.

Berdasarkan pemaparan kepala sekolah dalam wawancara, tujuan dari pelaksanaan kebijakan program pendidikan inklusif di sekolah tersebut adalah agar anak-anak berkebutuhan khusus yang berkategori inklusif dapat tertangani secara profesional sehingga anak-anak tersebut mendapat pelayanan yang semestinya.

“Dengan perbedaan latar belakang anak yang berkebutuhan khusus terkadang masih ada guru yang acuh, men cap anak bodoh, nakal, mendapat perlakuan dan layanan yang kurang, dipandang sebelah mata juga, padahal mereka butuh layanan khusus untuk menunjang pendidikan dan memperoleh hak yang sama dengan siswa yang lain dalam memperoleh pendidikan.” (KS, 29/07/2019).

Menurut hasil wawancara, pelaksanaan kebijakan program pendidikan inklusif di SDN Betet 1 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Selain itu, dasar pelaksanaan kebijakan program pendidikan inklusif tersebut juga mengacu pada

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

“Dasar hukum pelaksanaan pendidikan inklusif ini nanti bisa *sampean* baca di SK dan di PPT yang saya berikan, intinya mengacu pada Permendiknas No. 70 Th. 2009, Perda Kota Kediri No. 6 Th. 2016, dan Pergub juga tentang pendidikan inklusif” (KS, 29/07/2019).

Kota Kediri pada saat perda tersebut diterbitkan telah melaksanakan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak (KLA). Salah satu indikator Kota Layak Anak pada bidang pendidikan adalah terdapatnya Sekolah Ramah Anak. Maka, pada tahun 2017 Dinas Pendidikan Kota Kediri menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/547/419.109/2017 Tentang Pembentukan Sekolah Ramah Anak Tahun 2017.

Hasil dari evaluasi *context* pada pelaksanaan program pendidikan inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri telah memaparkan mengenai tiga komponen yaitu: latar belakang historis, tujuan pendidikan inklusif serta kebijakan dan peraturan acuan yang berlaku. Hasil wawancara dengan kepala sekolah menjelaskan bahwa sejarah awal sekolah melaksanakan program pendidikan inklusif adalah dari 2 guru SDN Betet 1 yang berkesempatan studi S-1 PGSD di Universitas Muhammadiyah Malang. Setelah menyelesaikan studinya, mereka membawa buku materi tentang pendidikan inklusif kemudian kepala sekolah membaca dan mempelajarinya. Kepedulian kepala sekolah akan nasib ABK di Kota Kediri yang masih kesulitan mendapat pelayanan pendidikan yang layak, maka kepala sekolah usul kepada Pemkot Kediri khususnya pada Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Lalu pada tahun 2010 SDN Betet 1 dan beberapa sekolah lainnya ditunjuk untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Tujuan dari pelaksanaan kebijakan program pendidikan inklusif di sekolah tersebut adalah agar anak-anak berkebutuhan khusus yang berkategori inklusif dapat tertangani secara profesional sehingga anak-anak tersebut mendapat pelayanan yang semestinya. Payung hukum atau dasar hukum dari pelaksanaan program pendidikan inklusif adalah dari Permendiknas No. 70 Th. 2009 Tentang Pendidikan Inklusif, Pergub Jatim No. 6 Th. 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Perda Kota Kediri No. 6 Th. 2016 Tentang Kebijakan Pengembangan KLA (Kota Layak Anak).

#### **4.2 Evaluasi *Input* Pada Program Pendidikan Inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri**

Evaluasi *input* pada pelaksanaan program pendidikan inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri mencakup beberapa komponen yakni: Sumber pembiayaan, sumber daya manusia, kesiswaan serta sarana dan prasarana. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber kepala sekolah, komite sekolah dan guru utama serta melakukan studi dokumen dan observasi.

Menurut data yang diberikan oleh kepala sekolah, pada tahun 2010 sampai dengan 2015 sekolah membiayai semua pelaksanaan kebijakan program pendidikan inklusif secara mandiri.

“Pemerintah sudah memberikan dana BOS Mas, tapi masih kurang. Soalnya pemerintah menyamakan BOS untuk sekolah reguler dan inklusif, padahal beban jelas sekali berbeda. Nah, karena itu kita masih tetap membutuhkan perhatian dan bantuan dari pemerintah untuk operasional pelaksanaan kebijakan program inklusif, seperti bantuan untuk pengembangan kompetensi guru seperti KKG, seminar, kerjasama dengan instansi terkait, diklat, *workshop*, dan *parenting* serta bantuan pelengkapan fasilitas dan sarana prasarana sekolah penunjang operasional pendidikan inklusif di SDN Betet 1.” (KS, 29/07/2019).

Pemerintah kota, daerah maupun provinsi pada saat itu belum memberikan perhatian. Pada tahun 2016, kepala sekolah tetap berupaya mendapatkan dana bantuan dari pemerintah dengan membuat proposal pengajuan dana bantuan kepada pemerintah Kota Kediri. Data mengenai bantuan dari pemerintah juga didukung dengan hasil dokumen yang ada pada **Lampiran 8.4 Dokumentasi** halaman 54 dan 56.

“Tahun 2016 saya mengajukan proposal yang intinya minta bantuan berupa fisik dan non fisik itu Mas, nah Alhamdulillah tahun 2017 semua bantuan tersebut proses realisasi oleh pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendidikan Kota Kediri secara bertahap sampai sekarang.” (KS, 29/07/2019).

Kemudian data yang didapat dari Komite sekolah menyebutkan bahwa komite memiliki kebijakan yang diterapkan sebagai upaya penambahan biaya untuk gaji honorer para GPK yakni mengadakan biaya tambahan setiap bulan bagi siswa ABK sebesar Rp. 60.000. Kebijakan tersebut sudah mendapat persetujuan dan dukungan dari kepala sekolah, GPK dan para wali murid ABK.

“Iya Mas, memang sekolah masih mengalami kendala untuk honor GPK. Terus pada waktu rapat komite kita usul bagaimana kalau mengadakan iuran per bulan. Dan banyak yang setuju terlebih dari para orang tua ABK. Terus kita menyepakati untuk biaya iurannya 60 ribu itu” (K, 30/08/2019).

Data hasil penelitian selanjutnya menjelaskan tentang sumber daya manusia yang mencakup mengenai jumlah GTK dan spesifikasinya di SDN Betet 1. Data mengenai



SDM ini juga didukung oleh hasil studi dokumen yang ada pada **Lampiran 8.3 Studi Dokumen** halaman 48-50.

“Ini Mas, jadi untuk tahun ajaran 2018/2019 total GTK di SDN Betet 1 ada 36 orang, yang guru PNSnya 10, GTT/GPKnya 22, terus PTT 4 orang. Lha spesifikasinya itu yang S-2 tiga orang, S-1nya 28 orang, D-2 satu orang dan SMAny 4 orang” (KS, 29/07/2019).

Lebih lanjut, kepala sekolah memaparkan bahwa untuk GPK kami masih berstatus GTT dan belum sesuai kualifikasi pendidikannya. Data mengenai GPK ini juga didukung oleh hasil observasi dan studi dokumen yang ada pada **Lampiran 8.2 Hasil Observasi** halaman 43 dan **8.3 Studi Dokumen** halaman 44.

“Kami masih kesulitan Mas untuk mendapatkan tenaga pendidik khususnya GPK yang berlatar belakang pendidikan yang linier untuk menangani para siswa berkebutuhan khusus di SDN Betet 1 karena belum adanya bantuan dan perhatian pemerintah dalam hal pengadaan dan pengangkatan GTK untuk sekolah inklusif” (KS, 29/07/2019).

Maka upaya kepala sekolah untuk para GPK adalah dengan mengikuti pelatihan, seminar, magang, *workshop* tentang pendidikan inklusif agar kompetensi mereka berkembang dan keilmuan mereka bertambah.

“Untuk GPKnya memang kebanyakan lulusan S-1 PGSD Mas, yang linier lulusan pendidikan khusus itu belum ada. Ya kita ikutkan magang, diklat, seminar, *workshop* untuk menambah ilmu mereka” (KS, 29/07/2019).

Hanya itu upaya yang mampu kepala sekolah berikan, karena untuk mencari GPK yang linier bahkan profesional membutuhkan waktu yang lama sedangkan sekolah memerlukan tenaga GPK dengan segera. Dalam hal honorarium juga masih mengalami kendala karena terbatasnya jumlah anggaran operasional yang dimiliki oleh sekolah. Terdapat Guru *Shadow* di sekolah tersebut namun bersifat kondisional (jika diperlukan) dan berasal dari para GPK. Orang tua siswa dapat menyediakannya sendiri sesuai dengan kondisi anaknya yang bersekolah di sekolah tersebut.

Menurut data yang disampaikan oleh Guru Utama tentang kesiswaan, pada tahun 2018/2019 sekolah menerima peserta didik dengan total 272 siswa yang terdiri dari siswa reguler berjumlah 215 siswa dan siswa ABK berjumlah 57 siswa. Data kesiswaan ini juga didukung dari hasil studi dokumen yang ada pada **Lampiran 8.3 Studi Dokumen** halaman 51-53.

“Jadi kalau berdasarkan jenis ketunaannya, rincian data siswa ABK tahun 2018/2019 adalah sebagai berikut: Tuna grahita ringan berjumlah 13 siswa; Tuna

grahita sedang berjumlah 3 siswa; Autis terdapat 1 siswa; Gangguan konsentrasi dan lambat bicara berjumlah 1 siswa; Lambat belajar berjumlah 12 siswa; Tuna laras berjumlah 1 siswa; Kesulitan belajar berjumlah 1 siswa; Tuna daksa sedang berjumlah 3 siswa; *Down syndrome* dan tuna grahita sedang berjumlah 1 siswa dan Hambatan pendengaran berjumlah 2 siswa. Sedangkan menurut kriteria yang ditentukan berdasarkan asesmen psikolog adalah: Diatas rata-rata berjumlah 9 siswa, dibawah rata-rata berjumlah 7 siswa dan rata-rata berjumlah 3 siswa” (GU, 07/08/2019).

Pada tahun 2010 hingga 2016 sekolah menerima peserta didik inklusif secara langsung karena pada saat itu antusias masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus di sekolah tersebut sangat banyak.

“Pas dulu awal-awal SD ini menerima semua murid inklusif Mas. Jadi, semua jenis ABK kita tampung, ada yang autis, *down syndrome*, *hyper active* dan sebagainya” (KS, 29/07/2019).

Kemudian mulai pada tahun 2017 hingga sekarang proses penerimaan siswa baru atau biasa yang disebut dengan PPDB untuk siswa inklusif di sekolah tersebut berbeda dengan siswa reguler.

“Beda Mas, kalau siswa inklusif sistem PPDBnya harus melakukan asesmen dulu di psikolog. Kita untuk psikolognya dari IAIN Kediri, kita sudah kerjasama, jadi sebelum siswa datang ke sekolah, ke IAIN dulu ke laboratoriumnya buat asesmen” (GPK, 07/08/2019).

Kerjasama tersebut tidak hanya sebatas SDN Betet 1 dengan IAIN Kediri saja, namun ada penandatanganan *MoU* antara Dinas Pendidikan dan IAIN Kediri sebagai pihak yang melakukan asesmen untuk siswa inklusif di Kota Kediri.

“Alhamdulillah Mas, semua bantuan-bantuan yang saya cantumkan di proposal direalisasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri salah satunya ya itu, Dinas kerjasama dengan IAIN Kediri untuk asesmen siswa inklusif” (KS, 29/07/2019).

Secara umum proses PPDB di sekolah tersebut sudah secara online dan khusus untuk pendidikan inklusif, terdapat sebuah peraturan untuk kriteria IQ minimum 70 agar dapat masuk ke sekolah inklusif.

“Sekolah inklusif sama SLB beda Mas. Kalau inklusif ada kriteria IQ minimal 70 buat siswa ABK yang mau bersekolah disitu.” (GPK, 07/08/2019).

Namun terjadi perbedaan pada kondisi di lapangan pada saat PPDB. Masih terdapat siswa yang dibawah kriteria IQ minimal 70 dan seharusnya mereka ditangani oleh SLB, namun bersekolah di SDN Betet 1.

“Nah itu Mas, masalahnya banyak orang tua wali murid itu yang memaksa untuk menyekolahkan anaknya karena faktor ekonomi Mas. Dan katanya lebih dekat juga dengan rumah.” (KS, 29/07/2019).

“Padahal sudah dijelaskan Mas dari psikolognya, kalau anaknya tidak bisa sekolah di SDN Betet 1 karena tidak sesuai kriteria minimal.” (GPK, 07/08/2019).

Banyak orang tua murid tetap memaksa karena berkenaan dengan kondisi sosial dan ekonomi. Masih banyak orang tua yang memandang SLB itu negatif dan banyak pula orang tua murid belum mengetahui tentang pendidikan inklusif serta kondisi anaknya secara menyeluruh. Orang tua hanya menginginkan anaknya agar bisa bersekolah seperti anak-anak normal lainnya. Selain itu, mereka mengeluh bahwa biaya untuk menempuh pendidikan di SLB mahal.

Pada saat wawancara dengan kepala sekolah, beliau menjelaskan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah tersebut yang mendukung proses kegiatan pendidikan inklusif di sekolah diperoleh dari pemerintah. Data mengenai sarana dan prasarana ini juga didukung oleh hasil observasi dan studi dokumen yang ada pada **Lampiran 8.2 Hasil Observasi** halaman 43 dan **8.3 Studi Dokumen** halaman 46-47.

“Ada kamar mandi untuk disabilitas, ruang terapi ABK, media pengajaran untuk membantu ABK, media terapi ABK sudah dipenuhi oleh pemerintah. Tapi ada yang belum mas, kami masih butuh ruang kelas, ruang tantrum, buku modul sama buku penunjang guru untuk inklusif ini masih belum dapat.” (KS, 29/07/2019).

Dikarenakan beberapa sarana dan prasarana penunjang belum tersedia, maka sekolah membagi kelas yang di dalam 1 gedung berisi 6 kelas inklusif serta para GPK membuat modul sendiri untuk menunjang pembelajaran siswa inklusif.

Hasil temuan evaluasi *Input* pada pelaksanaan program pendidikan inklusif di SDN Betet 1 mencakup empat komponen yaitu: Sumber pembiayaan, sumber daya manusia, kesiswaan serta sarana dan prasarana. Sumber dana yang dimiliki oleh sekolah tersebut adalah dari pemerintah dengan dana BOS. Dikarenakan sekolah tersebut ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, maka dana BOS belum mencukupi sebagai anggaran pembiayaan operasional pendidikan inklusif. Pada awal ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif tahun 2010-2016, sekolah membiayai secara mandiri hingga pada tahun 2017 pemerintah memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan oleh sekolah melalui pengajuan proposal pada tahun 2016. Kemudian upaya komite sekolah untuk membantu penambahan anggaran sebagai biaya honorarium GPK adalah dengan membuat kebijakan berupa usulan untuk pembayaran iuran sebesar Rp.

60.000 kepada orang tua/wali murid ABK dan telah disepakati oleh seluruh warga sekolah termasuk orang tua/wali murid ABK melalui rapat musyawarah. SDM yang dimiliki oleh SDN Betet 1 pada tahun 2018/2019 berjumlah 36 orang yang didominasi oleh lulusan S-1 dan status kepegawaian terbanyak adalah GTT khususnya untuk para GPK. Kualifikasi para GPK yang dimiliki oleh sekolah tersebut belum linier sesuai dengan pendidikannya. Untuk meningkatkan kompetensi para GPK, kepala sekolah mengikutkan mereka untuk melakukan magang, diklat, seminar dan *workshop*. Untuk kesiswaan pada tahun 2018/2019 sekolah menerima peserta didik dengan total 272 siswa yang terdiri dari siswa normal berjumlah 215 dan siswa ABK dengan berbagai ketunaan berjumlah 57 siswa. Pada tahun 2017 untuk sistem PPDB siswa inklusif diadakan asesmen karena tidak semua jenis peserta didik ABK dapat menempuh pendidikan di sekolah inklusif. Terdapat kriteria IQ minimal 70 yang harus dicapai oleh calon siswa inklusif dan sebelum mendaftar ke sekolah terlebih dahulu melakukan asesmen di IAIN Kediri yang telah berkerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Kediri sebagai lembaga yang melakukan asesmen siswa inklusif. Pada kondisi di lapangan, masih ditemukan siswa yang dibawah IQ 70 bersekolah di sekolah tersebut karena seharusnya yang menangani mereka adalah SLB. Sarana dan prasarana untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dimiliki oleh SDN Betet 1 sudah cukup lengkap seperti: kamar mandi untuk disabilitas, ruang terapi ABK, media terapi ABK dan media pengajaran membantu ABK.

#### **4.3 Evaluasi *Process* Pada Program Pendidikan Inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri**

Evaluasi *process* pada pelaksanaan program pendidikan inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri mencakup dua komponen yakni: proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dan proses penilaian. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber kepala sekolah dan guru pendamping khusus (GPK) serta melakukan observasi.

Dalam wawancara, GPK sekolah tersebut menjelaskan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk siswa inklusif. GPK menyebutkan beberapa tahapan dalam proses belajar mengajar siswa inklusif.

“Untuk proses KBMnya ada beberapa tahapan Mas, yaitu GPK melakukan observasi dan asesmen kepada siswa bersama dengan guru utama, orang tua siswa dan kepala sekolah, untuk penilaian asesmennya juga bisa diambil dari psikolog buat data pendukung, terus setelah melakukan asesmen, GPK membuat program

pembelajaran individu (PPI) terhadap setiap siswa yang mengacu pada RPP, silabus dan kurikulum 2013” (GPK, 07/08/2019).

Selain membuat PPI, para GPK secara sukarela membuat buku modul pelajaran yang tujuannya untuk memodifikasi sehingga menyederhanakan buku materi pelajaran dari kurikulum 2013 untuk para siswa inklusif termasuk juga membuat media pembelajarannya. Data yang berkaitan dengan hal ini juga didukung oleh hasil observasi yang ada pada **Lampiran 8.2 Hasil Observasi** halaman 42.

“Nah, kita juga membuat modul buku pembelajaran sendiri Mas secara sukarela karena dari pemerintah belum menyediakan. Modul ini adalah ringkasan dari buku materi bantuan pemerintah yang dari kurikulum K-13. Untuk membantu siswa, kita juga merancang beberapa media pembelajaran sesuai materi dan kemampuan siswa” (GPK, 07/08/2019).

Pada penentuan nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk siswa inklusif, SDN Betet 1 telah memberi sebesar 65.

“Untuk KKMnya kita tentukan 65 Mas. Sebelumnya pernah ditentukan untuk nilai KKM sebesar 70. Terus setelah kita melakukan evaluasi, banyak siswa inklusif yang belum mencapai KKM tersebut. Lalu kami melakukan rapat seluruh jajaran dan menyepakati untuk menurunkan nilai KKM dari 70 ke 65. Penentuan nilai KKMnya itu dari tiga aspek, kemampuan siswa, penguasaan materi dan kondisi sarana prasarana sekolah” (GPK, 07/08/2019).

Proses penilaian siswa inklusif secara keseluruhan mengacu pada program pembelajaran individu (PPI).

“Jadi begini Mas, semua rekaman proses pembelajaran, perkembangan kemampuan serta pencapaian siswa tercantum pada PPI. Nah untuk ujiannya, para GPK membuat soal ujian sendiri untuk siswa serta memberikan pendampingan kepada siswa tertentu yang punya keterbatasan atau ketidak mampuan dari segi fisik untuk mengerjakan soal ujian itu” (GPK, 07/08/2019).

Pada penilaian untuk kenaikan kelas maupun kelulusan siswa inklusif, didapat dari penilaian asesmen yang dilakukan oleh psikolog.

“Selain dari PPI, nanti ada psikolog juga yang memberi penilaian, evaluasi serta saran kepada siswa dan nanti orang tua/wali murid diberikan penjelasan mengenai hasilnya yang nanti apakah anaknya bisa bersekolah dimana, kelemahan kelebihannya apa, peningkatannya bagaimana dan seterusnya” (GPK, 07/08/2019).

Untuk sistem penilaian pada rapor siswa secara keseluruhan sama dengan siswa reguler, namun ada perbedaan pada deskripsi nilai dan kemampuan siswa di dalam

rapor tersebut untuk siswa yang tergolong ABK. Biasanya GPK menjelaskan secara langsung tentang perkembangan anak kepada orang tua/wali murid siswa.

“Untuk rapor pada dasarnya isinya sama Mas, cuma nanti pas bagian deskripsinya yang berbeda. Nanti ada deskripsi tambahan untuk siswa yang ABK dan biasanya langsung dijelaskan oleh GPKnya” (GPK, 07/08/2019).

Hasil penelitian evaluasi *Process* pada pelaksanaan program pendidikan inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri telah menjelaskan bahwa terdapat dua komponen yaitu proses KBM dan proses penilaian. Proses KBM inklusif di sekolah tersebut dimulai dengan GPK melakukan asesmen kepada setiap siswa bersama dengan kepala sekolah, guru utama dan orang tua/wali murid. Nantinya, hasil dari asesmen tersebut sebagai bahan untuk pembuatan program pembelajaran individu (PPI) yang secara umum tetap mengacu pada RPP dan kurikulum yang berlaku. Para GPK juga berinisiatif untuk membuat modul untuk siswa inklusif yang menyederhanakan dari buku materi kurikulum yang berlaku serta membuat media pembelajaran. Standar KKM untuk siswa inklusif di SDN Betet 1 adalah 65. Proses penilaian siswa inklusif seluruhnya mengacu pada PPI dan untuk penilaian kelulusan dan kenaikan kelas pada siswa inklusif berdasarkan hasil asesmen psikolog IAIN Kediri. Untuk rapor siswa inklusif secara umum tidak berbeda dengan rapor siswa reguler, yang membedakan hanya pada bagian deskripsinya saja.

#### **4.4 Evaluasi *Product* Pada Program Pendidikan Inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri**

Evaluasi *product* pada pelaksanaan program pendidikan inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri mencakup hasil dari pelaksanaan program tersebut yang meliputi dua komponen yaitu prestasi siswa inklusif dan akibat pelaksanaan kebijakan program pendidikan inklusif bagi masyarakat. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber kepala sekolah, guru pembimbing khusus (GPK) dan orang tua/wali siswa serta melakukan studi dokumentasi.

Sejak sekolah tersebut ditunjuk sebagai sekolah inklusif pada tahun 2010, para siswa dan siswi inklusif telah banyak menyumbangkan prestasi terutama pada bidang kesenian dan olah raga. Data mengenai prestasi siswa inklusif juga didukung dengan hasil dokumen yang ada pada **Lampiran 8.4 Dokumentasi** halaman 54.



“Ada Mas. Ada yang juara lomba puisi, terus pas ada perlombaan Paralympic dan O2SN ada tiga anak yang juara. Laki-laki kelas 6 dia tuna grahita juara 1 tolak peluru. Terus, laki-laki kelas 5 dia tuna grahita juara 2 lompat jauh, ada yang perempuan kelas 4 dia tuna rungu dan wicara juara 2 tolak peluru” (GPK, 28/8/2019).

Beberapa siswa inklusif yang telah mendapat prestasi tersebut hanya mendapat perhatian seperti *reward*, hadiah dan piagam saja. Belum tentu prestasi siswa tersebut dapat membantu mereka untuk mendapat beasiswa atau kemudahan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

“Saat ini belum ada Mas perhatian dari sekolah maupun pemerintah untuk memberi beasiswa atau kemudahan untuk mendaftar ke sekolah SMP atau jenjang selanjutnya dengan menggunakan prestasi siswa inklusif itu. Ya mereka cuma dikasih piagam, medali dan hadiah saja. Ya semoga ke depannya ada perhatian seperti itu” (GPK, 28/8/2019).

Ditunjuknya SDN Betet 1 sebagai sekolah inklusif yang sebelumnya adalah sekolah dasar negeri umum menimbulkan akibat yang menghasilkan beberapa tanggapan dari masyarakat, ada yang menanggapi secara positif dan ada juga yang menanggapi secara negatif.

“Nah, iya Mas. Masyarakat khususnya wali murid yang reguler ada yang bilang: lho nanti kalau ada anak ABK yang satu kelas sama anakku, nanti ketularan bagaimana? Terus kalau tanggapan dari masyarakat lingkungan sekitar sekolah bagus Mas. Dulu pernah ada siswa ABK tiba-tiba lari sampai keluar sekolah, terus ada warga yang melihat terus ikut membantu mengembalikan siswa itu ke sekolah” (KS, 29/07/2019).

Terdapat orang tua/wali murid siswa yang menyekolahkan anaknya memberikan tanggapan yang positif terhadap dampak dari pelaksanaan kebijakan program pendidikan inklusif.

“Saya bersyukur Mas, ya kalau ada sekolah inklusif itu saya tidak bingung buat menyekolahkan anak saya. Biayanya juga lebih murah dari SLB. Anak saya juga *krasan* dan agak *pinter* dari sebelumnya” (ORTU, 20/08/2019).

Pada prestasi akademik seperti pencapaian siswa selama bersekolah di sekolah tersebut, jumlah lulusan dan pendidikan lanjutan lulusan seperti apa, ini menjadi keterbatasan pada penelitian ini karena peneliti tidak memperoleh data tersebut. Data-data yang mencantumkan hal-hal mengenai prestasi akademik tersebut mengandung identitas siswa yang bersifat rahasia.

Dalam evaluasi *product* telah dipaparkan mengenai hasil penelitian berdasarkan dari wawancara pada beberapa narasumber tentang hasil dari pelaksanaan program yang meliputi prestasi siswa inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri dan akibat dari hasil pelaksanaan kebijakan program pendidikan inklusif bagi masyarakat. Selama sekolah tersebut menjadi penyelenggara pendidikan inklusif terdapat beberapa siswa ABK yang meraih prestasi terutama pada bidang seni dan olah raga. Siswa berprestasi tersebut mendapat perhatian seperti *reward*, hadiah dan piagam saja dan hasil prestasinya belum bisa membantu mereka sebagai beasiswa atau bantuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Akibat dari pelaksanaan kebijakan program pendidikan inklusif terhadap masyarakat sekitar lingkungan sekolah maupun dari orang tua/wali murid ada yang menanggapi dengan negatif karena pada dasarnya belum mengetahui dan ada pula yang menanggapi dengan positif serta mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri.

## **5. Pembahasan**

### **5.1 Evaluasi *Context* Pada Program Pendidikan Inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri**

Menurut Stufflebeam et al (2002) tujuan evaluasi konteks yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu program serta tujuan dari program tersebut. Hal-hal yang menjadi latar belakang pelaksanaan program pendidikan inklusif di SDN Betet 1 telah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hasil penelitian evaluasi *CIPP* terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusif pada komponen *context* yang memaparkan bahwa latar belakang sekolah dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif sebagian besar ditunjuk oleh pemerintah setempat (Widyawati, 2017; Suryati & Haryanto, 2016). Sekolah tersebut telah menyelenggarakan pendidikan inklusif pada tahun 2010, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Tentang Penetapan Sekolah Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi dan/atau Bakat Istimewa Nomor: 420/0901/419.42/2010 tahun 2010 dan pada proses penunjukan SDN Betet 1 menjadi sekolah inklusif oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal

4 Ayat 1 yang mencantumkan tentang pemerintah kabupaten/kota setidaknya menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Tujuan dari pelaksanaan program pendidikan inklusif di SDN Betet 1 telah sesuai dengan Depdiknas (2010) yang memaparkan bahwa tujuan pendidikan inklusif adalah untuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap pendidikan, tanpa adanya diskriminasi, dengan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada semua peserta didik. Didukung dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Pasal 2 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pasal 2 bahwa tujuan dari pendidikan inklusif adalah memberi kesempatan yang seluas luasnya kepada semua peserta didik ABK untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku hingga sekarang ini tentang pendidikan inklusif yakni UU No. 20 Th. 2003 Pasal 3 Ayat 1 dan 2, PP No. 19 Th. 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 41 Ayat 1, Permendiknas No. 70 Tahun 2009 dan Pergub Jatim No. 6 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Inklusif. Pemerintah Kota Kediri juga menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sekolah Inklusif No. 420/2894/419.42/2014. Data tersebut juga didukung dengan hasil studi dokumen yang menemukan bahwa Kota Kediri telah menerapkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dengan menerbitkan peraturan Walikota Kediri Provinsi Jawa Timur Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Pada Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia No. 12 Th. 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 11, indikator KLA untuk klaster pendidikan yang harus terpenuhi ialah terdapatnya Sekolah Ramah Anak (SRA). Sedangkan menurut Buku Panduan Sekolah Ramah Anak salah satu ciri-ciri SRA adalah melaksanakan proses pembelajaran yang inklusif dan nondiskriminatif (Rosalin, 2015). Maka Dinas Pendidikan Kota Kediri menerbitkan SK Nomor 420/547/419.109/2017 Tentang Pembentukan Sekolah Ramah Anak Tahun 2017 kepada SDN Betet 1 Kota Kediri.

## **5.2 Evaluasi *Input* Pada Program Pendidikan Inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri**

Stufflebeam et al (2002) menjelaskan bahwa evaluasi *input* berguna untuk mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang tersedia, alternative apa yang dipilih, rencana dan strategi apa untuk mencapai tujuan serta bagaimana prosedur kerjanya untuk mencapai tujuan yang meliputi beberapa komponen yaitu: Sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan serta berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Betet 1 berasal dari dana BOS namun belum mencukupi. Komite sekolah melaksanakan kebijakan untuk melakukan iuran sebagai bantuan pembiayaan operasional pendidikan inklusif pada sekolah tersebut. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Permendikbud Republik Indonesia No. 75 Th. 2016 Tentang Komite Sekolah Pasal 12 yang menyebutkan bahwa komite sekolah baik secara perseorangan maupun kolektif dilarang untuk melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya. Hal tersebut sangat kontradiksi, mengingat sekolah memang memerlukan dana tambahan dan orang tua/wali murid mendukung akan iuran tersebut. Pada Pergub Jatim No.6 Th. 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pasal 10 ayat 2 tercantum bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya GPK mendapatkan insentif tambahan dan jumlah angka kredit sesuai aturan yang berlaku.

Kualifikasi para GTK yang diperuntukkan sebagai pendidik di sekolah dasar memang telah sesuai dengan lampiran Permendiknas No. 16 Th. 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru telah dijelaskan bahwa guru SD harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum S-1 dalam bidang pendidikan SD (S-1 PGSD) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Namun, kualifikasi pendidikan para GPK SDN Betet 1 belum linier sesuai dengan bidang pendidikannya, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 41 Ayat 1 tercantum bahwa setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus memiliki GTK yang memiliki kompetensi untuk pelaksanaan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Menurut Kustawan (2012) untuk kualifikasi guru pembimbing khusus (GPK) harus berasal dari lulusan pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa (PLB), sedangkan kondisi kualifikasi GPK di SDN Betet 1 belum ada yang berasal dari lulusan pendidikan khusus maupun PLB.

Kepala sekolah melakukan pengembangan kompetensi guru kepada para GPK telah sesuai dengan Richard & Lockhart (2000) pengembangan kompetensi guru dapat melalui beberapa kegiatan seperti: *Workshop, seminars, internship, mentoring, CAR and project work*. Didukung dengan Permendiknas No. 70 Th. 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Pasal 10 ayat 4 dan ayat 5 pemerintah seharusnya membantu menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang membutuhkan serta membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus untuk para GTK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Pada Pergub Jatim No. 6 Th. 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pasal 7-a juga terdapat peraturan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk menyediakan GPK yang dapat memberikan program pembelajaran bagi siswa inklusif.

Pada proses penerimaan siswa baru yang mengharuskan melakukan asesmen terlebih dahulu ini telah sesuai dengan manajemen peserta didik yang mencakup beberapa poin yaitu pada penerimaan peserta didik: aspek identifikasi, asesmen dan penempatan peserta didik (Pendidikan, 2010). SDN Betet 1 berkerjasama dengan IAIN Kediri dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif khususnya pada bidang asesmen peserta didik ini sesuai dengan Permendiknas No. 70 Th. 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Pasal 11 Ayat 5 dan Pergub Jatim No. 6 Th. 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pasal 14 bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan komite sekolah, yayasan, dewan pendidikan, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi serta lembaga lainya baik dari swasta maupun pemerintah.

Siswa ABK yang diterima di sekolah tersebut telah sesuai dengan Permendiknas No. 70 Th. 2009 Pasal 3 ayat 2 dan Pergub Jatim No. 6 Th. 2011 Pasal 11 ayat 2 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang mencantumkan tentang jenis-jenis peserta didik untuk mengikuti pendidikan inklusif di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yaitu: tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, tuna ganda, memiliki kelainan lainnya, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Didukung oleh pendapat Abdul et al (2009) yang memaparkan bahwa terdapat beberapa anak berkebutuhan khusus (ABK) yang termasuk dalam kategori permanen yaitu: Tuna netra,

gangguan pendengaran dan/atau wicara, tuna grahita, memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, tuna daksa, tuna laras, kesulitan belajar, lamban belajar, dan autisme.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan inklusif sudah cukup memadai dan masih layak untuk digunakan. Proses pelengkapan fasilitas dan sarana prasarana tersebut akan terus berlangsung dari bantuan pemerintah setempat melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Pasal 6 bahwa pemerintah kabupaten/kota menjamin pelaksanaan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan siswa, menjamin tersedianya sumber daya, dan membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

### **5.3 Evaluasi *Process* Pada Program Pendidikan Inklusif di SDN 1 Betet Kota Kediri**

Pada model evaluasi program *CIPP*, evaluasi proses mengarah pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program serta untuk mengetahui sejauh mana rencana telah ditetapkan dan komponen mana yang masih perlu diperbaiki (Stufflebeam et al, 2002). Pada proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar siswa inklusif di SDN Betet 1 telah sesuai dengan pendapat Widayaiswara (2014) yang menjelaskan tentang manajemen kurikulum untuk pendidikan inklusif harus berdasarkan kebutuhan para peserta didik inklusif. Profil dari setiap peserta didik inklusif menghasilkan data yang digunakan untuk keperluan modifikasi kurikulum tersebut. Pada Permendiknas No. 70 Th. 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Pasal 7 dicantumkan bahwa sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang menyediakan atau menyesuaikan kemampuan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Pada pasal 8 menyebutkan proses pembelajaran pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang menyesuaikan peserta didik. Sedangkan menurut Pergub Jatim No.6 Th. 2011 Pasal 9 Ayat 2 pelaksanaan proses belajar mengajar pendidikan inklusif harus memperhatikan hasil asesmen dan perbedaan kemampuan setiap individu siswa berkebutuhan khusus.

Untuk proses penilaian siswa inklusif telah sesuai berdasarkan pada Permendiknas No. 70 Th. 2009 Pasal 8 Ayat 1 penilaian bagi siswa inklusif mengacu pada jenis kurikulum pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Kemudian penggunaan Program Pembelajaran Individual (PPI) diatur dalam Pergub Jatim No. 6 Th. 2011 Pasal 10 yang menyebutkan beberapa tugas Guru Pendamping Khusus (GPK) salah satunya



adalah melakukan proses identifikasi, asesmen, dan menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI).

#### **5.4 Evaluasi *Product* Pada Program Pendidikan Inklusif di SDN 1 Betet Kota Kediri**

Stufflebeam (2002) mengatakan bahwa evaluasi produk harus menilai hasil yang diinginkan dan tidak diinginkan serta hasil yang positif dan negatif (*positive and negative outcomes*). Selain itu, evaluator harus sering memperluas evaluasi produk untuk menilai hasil jangka panjang (*long term outcomes*). Hasil dari evaluasi produk menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan inklusif di SDN Betet 1 berjalan dengan baik yaitu ditunjukkan dengan adanya *positive outcomes* dari pencapaian prestasi akademik dan non akademik oleh para siswa inklusif. Akan tetapi untuk prestasi akademik peneliti mengalami keterbatasan dalam memperoleh data tersebut. Pada *long term outcomes* perlu adanya perhatian pemerintah mengenai prestasi non akademik yang diperoleh siswa inklusif agar dapat dijadikan sebagai beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Hasil dari pelaksanaan program pendidikan inklusif di sekolah tersebut terhadap masyarakat sekitar lingkungan sekolah maupun dari orang tua/wali murid ada yang menanggapi dengan negatif karena pada dasarnya belum mengetahui dan ada pula yang menanggapi dengan positif dengan mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri. Hal tersebut sesuai dengan Depdiknas (2010) yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor negatif dan positif terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. Faktor positif: Program jelas dan dapat diterima semua kalangan masyarakat sehingga mendapat dukungan penuh, sarana prasarana dan GTK dipersiapkan sebagai penunjang kebutuhan siswa inklusif, komitmen semua pihak dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, terdapat kerjasama antar semua pihak. Faktor negatif: *Practical barriers*: sarana prasarana, pembiayaan, kondisi geografis, kurang SDM di satuan pendidikan, fasilitas pendukung belum memadai. *Power Barriers*: peraturan yang belum tersedia, tata tertib dan perizinan yang menghalangi pelaksanaan pendidikan inklusif. *Psychological Barriers*: kondisi psikologis para pelaksana program/kebijakan pendidikan inklusif yang belum siap dan tidak percaya diri. *Value Barriers*: pernyataan bahwa ABK merupakan individu yang memiliki kemampuan terbatas, termarginalkan dan tidak mempunyai kegunaan.

## 6. Kesimpulan dan Saran

Evaluasi *context* pada program pendidikan inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri memaparkan bahwa pelaksanaan program pendidikan inklusif di sekolah tersebut memiliki tujuan yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku baik di Permendiknas dan Pergub Jatim. Kekuatan pada pelaksanaan program pendidikan inklusif di sekolah tersebut terletak pada kebijakan dan peraturan yang berlaku baik di Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendiknas, Pergub Jatim, Surat Keputusan, Perda Kota Kediri serta Peraturan Menteri. Dengan adanya peraturan-peraturan yang tercantum pada pelaksanaan program pendidikan inklusif di sekolah tersebut, maka pelaksanaan program telah resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi *input* pada program pendidikan inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri secara umum telah sesuai dengan standar permendiknas dan pergub jatim. Masih dijumpai beberapa tantangan yaitu yang pertama mengenai sumber pembiayaan berasal dari dana BOS yang belum mencukupi untuk biaya operasional pendidikan inklusif. Kedua, sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah tersebut telah cukup tersedia untuk proses pelaksanaan kegiatan pendidikan namun untuk pelaksanaan pendidikan inklusif sekolah yang bersangkutan belum memiliki GPK yang linier/profesional. Ketiga, pada proses penerimaan peserta didik inklusif masih terdapat kendala karena terdapat siswa yang seharusnya ditangani oleh SLB namun tetap bersekolah di sekolah inklusif. Keempat, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah tersebut juga telah cukup sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif namun masih terdapat beberapa fasilitas penunjang yang masih dibutuhkan sekolah.

Evaluasi *process* pada program pendidikan inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri menjelaskan bahwa proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dan proses penilaian inklusif di sekolah tersebut secara keseluruhan telah sesuai dengan permendiknas dan pergub jatim dengan melakukan asesmen pada siswa ABK yang nantinya hasil dari asesmen tersebut sebagai bahan perancangan program pembelajaran individu (PPI). Kurikulum juga mengalami modifikasi seperti penurunan level materi dengan penyederhanaan buku materi melalui modul yang dibuat oleh GPK.

Pada evaluasi *product* program pendidikan inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri menjelaskan bahwa hasil dari penyelenggaraan program adalah terdapat *positive*

*outcome* yang berupa prestasi siswa inklusif pada bidang seni dan olah raga. Pada *long term outcome* belum ada karena pemerintah belum memberi perhatian mengenai prestasi siswa inklusif tersebut agar dapat digunakan sebagai beasiswa. Akibat dari pelaksanaan program pendidikan inklusif terhadap masyarakat eksternal maupun internal lingkungan sekolah ada yang positif dengan mendukung dan memberikan harapan bahwa kedepannya program pendidikan inklusif tetap terselenggara dan lebih baik lagi, ada pula yang menanggapi dengan negatif karena ada kekhawatiran yang disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai pemahaman dari pendidikan inklusif tersebut.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran berupa rekomendasi untuk tetap melaksanakan program pendidikan inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri karena berdasarkan hasil dari evaluasi terdapat beberapa kelebihan yang menjadi kekuatan dari program yang muncul pada hasil evaluasi *Context, Input, Process* dan *Product*. Untuk beberapa tantangan yang ditemukan pada evaluasi *input* dan *product* kepala sekolah harus tetap memperhatikan, memantau dan mengawasi setiap proses dari pelaksanaan program pendidikan inklusif untuk meminimalisir *gap* yang terjadi di lapangan guna menjaga agar penyelenggaraan tetap berjalan dengan baik; Menjaga komunikasi dengan pihak *stakeholder* seperti Dinas Pendidikan Kota Kediri, masyarakat, komite sekolah, orang tua/wali murid serta seluruh GTK khususnya para GPK serta IAIN Kediri agar bantuan-bantuan penunjang pendidikan inklusif segera didapat; Bantuan untuk menyekolahkan anaknya ke SLB bagi yang tidak dapat bersekolah di sekolah inklusif agar diberikan kepada orang tua/wali murid yang membutuhkan; Kesejahteraan dan kompetensi para GPK perlu mendapat perhatian dari pemerintah; Kepala sekolah dan pemerintah harus tetap berupaya untuk menyediakan GPK yang profesional; Pemerintah harus memberikan perhatian kepada siswa inklusif yang berprestasi dengan memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

## **7. Rujukan**

Abdullah, N. (2013). *MENGENAL ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS*. Jakarta: Media PLB

- Abdul, S. et al. (2009). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Secara Inklusif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Ali, L. U., Suastra, I. W., & Sudiatmika, A. A. I. A. R. (2013). Pengelolaan Pembelajaran IPA Ditinjau dari Hakikat Sains pada SMP di Kabupaten Lombok Timur. *E Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Arlina. (2016). EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSI DI SMK NEGERI 6 PADANG. *TINGKAP*, XII(1), 1–11.
- Akbar, F. M. & Mohi, K. W. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Arikunto, S. et al. (2009) *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Prkatisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2012). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Depdiknas. (2010). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Pendidikan. *Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah, Jakarta*.
- Dunn, N. W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Halder, C. K & Das, C. A. Dr. (2018). Important of Inclusive Education in Present context. *RESEARCH REVIEW International Joaurnal of Multidisciplinary*, 03(08), 463-470. <https://doi.org/10.1016/2455-3085.2018.08.007>
- Hidayat, E. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, XXI(1).
- Kovacevic, J & Petrovic, M. D. (2011). Inclusive education – Empirical experience from Serbia. *International Journal of Educational Development*, 32(2012), 463-470. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2011.11.008>
- Kustawan, D. (2012). *Pendidikan Inklusif & Upaya Implementasinya*. Jakarta: Luxima.
- Madaus, G. F. et al. (1983) *Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. *Jurnal At-Ta'dib*, 6(1), 111-125.
- Miles, B. M. & Huberman, M. A. (1994). *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis Second Edition*. California: SAGE Publications, Inc.
- Mulyatiningsih, E. (2011). *Evaluasi Proses Suatu Program*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Nurharjadmo, W., & Negara, J. A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Magister Manajemen*.
- Owen, J. M. (1993). *Program Evaluation: Form and Approaches*. St. Leonard: Allen & Unwin Pty Ltd.
- Pendidikan, D. (2010). *PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF (TK, SD, SMP, SMA, SMK)*. Surabaya: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- Ro'fah, M. & Andayani, A. (2010). *Inklusi Pada Pendidikan Tinggi (I)*. Yogyakarta: Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sobri, A., Y. (2016). Model-Model Pengembangan Profesionalisme Guru. *Jurnal Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfa Beta.
- Sukinah. (2013). Sistem Penilaian Hasil Belajar Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Implementasi Pendidikan Setting Inklusi. *Jurnal FIP UNY*, 4(2), 101-117.
- Sulistiyadi, H. K. (2014). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*.
- Suryati, E. A. & Haryanto, S. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif di Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo Yogyakarta. *WIYATA DHARMA: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 4(2), 188-193.
- Suryobroto, B. (2004). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Stufflebeam, L. D. et al. (2002). *EVALUATION MODELS Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation Second Edition*. New York: Kluwer Academic Publishers.
- Stufflebeam, L. D. & Shinkfield, J. A. (1986). *Systematic Evaluation: A Self-Instructional Guide to Theory and Practice*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Tahir, N. (2011). Pendidikan inklusif. *Pendidikan Khas Di Malaysia*.
- Wartomo. (2016). Pelaksanaan Model Pendidikan Inklusif di Sekolah Wilayah D.I. Yogyakarta. *MUKADDIMAH Jurnal Studi Islam*, 1(1), 197-220.
- Widyaiswara, D. (2014). Manajemen Kurikulum. *Pendidikan*.
- Widyawati, R. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi Sekolah Dasar. *Kelola Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(1), 109-120.

- Widyodoko, P. E. (2009) *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Konsep*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yunata, R. et al. (2016). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo Kabupaten Rembang. *Jurnal Administrasi Pemerintah*, 2(7), 58-64.
- Yusuf, M. et al. (2017). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia. *JPPPLB*, 4(2), 147-154.



## 8. Lampiran

## 8.1 Rekap Wawancara

### 8.1.1 Wawancara dengan Kepala Sekolah

**Peneliti:** Bagaimana awal mula pelaksanaan program pendidikan inklusif di SDN Betet 1 Kota Kediri?

**Kepala Sekolah:** Sekitar dua tahun sebelum 2010, terdapat dua orang guru yang berkesempatan kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang di jurusan S1 PGSD. Setelah menyelesaikan studinya, mereka kembali bertugas di SDN Betet 1 dengan membawa ilmu yang telah mereka pelajari salah satunya tentang pendidikan inklusif. Lalu saya mempelajari buku materi tentang pendidikan inklusif tersebut (KS, 29/07/2019). Saya selama menjadi guru dulu berpikiran gini Mas, pasti ada anak disetiap sekolah yang lamban belajar, disabilitas, ada yang fisiknya terbatas tapi pinter dan sebaliknya, maka saya mengusulkan di setiap gugus mengadakan sekolah inklusif agar anak-anak bisa bersekolah dengan layak (CONTEXT KS, 29/07/2019).

**Peneliti:** Apa tujuan dari pelaksanaan program pendidikan inklusif di SDN Betet 1?

**Kepala Sekolah:** Dengan perbedaan latar belakang anak yang berkebutuhan khusus terkadang masih ada guru yang acuh, men cap anak bodoh, nakal, mendapat perlakuan dan layanan yang kurang, dipandang sebelah mata juga, padahal mereka butuh layanan khusus untuk menunjang pendidikan dan memperoleh hak yang sama dengan siswa yang lain dalam memperoleh pendidikan (CONTEXT KS, 29/07/2019).

**Peneliti:** Bagaimana dasar hukum atau payung hukum pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Betet 1?

**Kepala Sekolah:** Dasar hukum pelaksanaan pendidikan inklusif ini nanti bisa *sampean* baca di SK dan di PPT yang saya berikan, intinya mengacu pada Permendiknas No. 70 Th. 2009, Perda Kota Kediri No. 6 Th. 2016, dan Pergub juga tentang pendidikan inklusif (CONTEXT KS, 29/07/2019).

**Peneliti:** Bagaimana pembiayaan dari pelaksanaan program pendidikan inklusif di SDN Betet 1?

**Kepala Sekolah:** Pemerintah sudah memberikan dana BOS Mas, tapi masih kurang. Soalnya pemerintah menyamakan BOS untuk sekolah reguler dan inklusif, padahal beban jelas sekali berbeda. Nah, karena itu kita masih tetap membutuhkan perhatian dan bantuan dari pemerintah untuk operasional pelaksanaan kebijakan program inklusif, seperti bantuan untuk pengembangan kompetensi guru seperti KKG, seminar, kerjasama dengan intansi terkait, diklat, *workshop*, dan *parenting* serta bantuan pelengkapan fasilitas dan sarana prasarana sekolah penunjang operasional pendidikan inklusif di SDN Betet 1 (INPUT KS, 29/07/2019). Tahun 2016 saya mengajukan proposal yang intinya minta bantuan berupa fisik dan non fisik itu Mas, nah Alhamdulillah tahun 2017



semua bantuan tersebut proses realisasi oleh pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendidikan Kota Kediri secara bertahap sampai sekarang (INPUT KS, 29/07/2019).

**Peneliti:** Bagaimana dengan SDM yang dimiliki oleh SDN Betet 1?

**Kepala Sekolah:** Ini Mas, jadi untuk tahun ajaran 2018/2019 total GTK di SDN Betet 1 ada 36 orang, yang guru PNSnya 10, GTT/GPKnya 22, terus PTT 4 orang. Lha spesifikasinya itu yang S-2 tiga orang, S-1nya 28 orang, D-2 satu orang dan SMAny 4 orang (INPUT KS, 29/07/2019). Kami masih kesulitan Mas untuk mendapatkan tenaga pendidik khususnya GPK yang berlatar belakang pendidikan yang linier untuk menangani para siswa berkebutuhan khusus di SDN Betet 1 karena belum adanya bantuan dan perhatian pemerintah dalam hal pengadaan dan pengangkatan GTK untuk sekolah inklusif (INPUT KS, 29/07/2019). Untuk GPKnya memang kebanyakan lulusan S-1 PGSD Mas, yang linier lulusan pendidikan khusus itu belum ada. Ya kita ikutkan magang, diklat, seminar, *workshop* untuk menambah ilmu mereka (INPUT KS, 29/07/2019).

**Peneliti:** Bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki SDN Betet 1 sebagai penunjang pendidikan inklusif?

**Kepala Sekolah:** Ada kamar mandi untuk disabilitas, ruang terapi ABK, media pengajaran untuk membantu ABK, media terapi ABK sudah dipenuhi oleh pemerintah. Tapi ada yang belum Mas, kami masih butuh ruang kelas, ruang tantrum, buku modul sama buku penunjang guru untuk inklusif ini masih belum dapat (INPUT KS, 29/07/2019).

**Peneliti:** Bagaimana penerimaan peserta didik inklusif di SDN Betet 1?

**Kepala Sekolah:** Pas dulu awal-awal SD ini menerima semua murid inklusif Mas. Jadi, semua jenis ABK kita tampung, ada yang autisme, *down syndrome*, *hyper active* dan sebagainya (PROCESS KS, 29/07/2019).

**Peneliti:** Apakah SDN Betet 1 melakukan kerjasama dengan instansi lain untuk menunjang pelaksanaan pendidikan inklusif?

**Kepala Sekolah:** Alhamdulillah Mas, semua bantuan-bantuan yang saya cantumkan di proposal direalisasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri salah satunya ya itu, Dinas kerja sama dengan IAIN Kediri untuk asesmen siswa inklusif (PROCESS KS, 29/07/2019).

**Peneliti:** Apakah dampak dari pelaksanaan program pendidikan inklusif di SDN Betet 1 terhadap masyarakat?

**Kepala Sekolah:** Nah, iya Mas. Masyarakat khususnya wali murid yang regular ada yang bilang: lho nanti kalo ada anak ABK yang satu kelas sama anakku, nanti ketularan gimana? Terus kalo tanggapan dari masyarakat lingkungan sekitar sekolah bagus Mas.

Dulu pernah ada siswa ABK tiba-tiba lari sampai keluar sekolah, terus ada warga yang melihat terus ikut membantu mengembalikan siswa itu ke sekolah (PRODUCT KS, 29/07/2019).

### 8.1.2 Wawancara dengan Komite sekolah (K)

**Peneliti:** Apakah komite mempunyai kebijakan dalam hal bantuan pembiayaan untuk honor GPK?

**Komite:** Iya Mas, memang sekolah masih mengalami kendala untuk honor GPK. Terus pada waktu rapat, komite kita usul bagaimana kalau mengadakan iuran per bulan. Dan banyak yang setuju terlebih dari para orang tua ABK. Terus kita menyepakati untuk biaya iurannya 60 ribu itu (INPUT K, 30/08/2019).

### 8.1.3 Wawancara dengan Guru Utama (GU)

**Peneliti:** Bagaimana kesiswaan yang dimiliki oleh SDN Betet 1?

**Guru Utama:** Jadi kalau berdasarkan jenis ketunaannya, rincian data siswa ABK tahun 2018/2019 adalah sebagai berikut: Tuna grahita ringan berjumlah 13 siswa; Tuna grahita sedang berjumlah 3 siswa; Autis terdapat 1 siswa; Gangguan konsentrasi dan lambat bicara berjumlah 1 siswa; Lambat belajar berjumlah 12 siswa; Tuna laras berjumlah 1 siswa; Kesulitan belajar berjumlah 1 siswa; Tuna daksa sedang berjumlah 3 siswa; *Down syndrome* dan tuna grahita sedang berjumlah 1 siswa dan Hambatan pendengaran berjumlah 2 siswa. Sedangkan menurut kriteria yang ditentukan berdasarkan asesmen psikolog adalah: Diatas rata-rata berjumlah 9 siswa, dibawah rata-rata berjumlah 7 siswa dan rata-rata berjumlah 3 siswa (INPUT GU, 07/08/2019).

### 8.1.4 Wawancara dengan Orang Tua siswa inklusif (ORTU)

**Peneliti:** Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan dampak dari SDN Betet 1 melaksanakan pendidikan inklusif?

**Orang Tua:** Saya bersyukur Mas, ya kalau ada sekolah inklusif itu saya tidak bingung buat menyekolahkan anak saya. Biayanya juga lebih murah dari SLB. Anak saya juga *krasan* dan agak *pinter* dari sebelumnya (PRODUCT ORTU, 20/08/2019).

### 8.1.5 Wawancara dengan Guru Pendamping Khusus (GPK)

**Peneliti:** Apakah ada perbedaan sistem PPDB siswa inklusif dengan siswa reguler?

**GPK:** Beda Mas, kalau siswa inklusif sistem PPDBnya harus melakukan asesmen dulu di psikolog. Kita untuk psikolognya dari IAIN Kediri, kita sudah kerjasama, jadi sebelum siswa datang ke sekolah, ke IAIN dulu ke laboratoriumnya buat asesmen (PROCESS GPK, 07/08/2019).

**Peneliti:** Apakah perbedaan SLB dengan sekolah inklusif?

**GPK:** Sekolah inklusif sama SLB beda Mas. Kalau inklusif ada kriteria IQ minimal 70 buat siswa ABK yang mau bersekolah disitu (PROCESS GPK, 07/08/2019).

**Peneliti:** Bagaimana proses kegiatan belajar mengajar siswa inklusif?

**GPK:** Untuk proses KBMnya ada beberapa tahapan Mas, yaitu GPK melakukan observasi dan asesmen kepada siswa bersama dengan guru utama, orang tua siswa dan kepala sekolah, untuk penilaian asesmennya juga bisa diambil dari psikolog buat data pendukung, terus setelah melakukan asesmen, GPK membuat program pembelajaran individu (PPI) terhadap setiap siswa yang mengacu pada RPP, silabus dan kurikulum 2013 (PROCESS GPK, 07/08/2019). Nah, kita juga membuat modul buku pembelajaran sendiri Mas secara sukarela karena dari pemerintah belum menyediakan. Modul ini adalah ringkasan dari buku materi bantuan pemerintah yang dari kurikulum K-13. Untuk membantu siswa, kita juga merancang beberapa media pembelajaran sesuai materi dan kemampuan siswa (PROCESS GPK, 07/08/2019).

**Peneliti:** Bagaimana kriteria ketuntasan minimal untuk siswa inklusif?

**GPK:** Untuk KKMnya kita tentukan 65 Mas. Sebelumnya pernah ditentukan untuk nilai KKM sebesar 70. Terus setelah kita melakukan evaluasi, banyak siswa inklusif yang belum mencapai KKM tersebut. Lalu kami melakukan rapat seluruh jajaran dan menyepakati untuk menurunkan nilai KKM dari 70 ke 65. Penentuan nilai KKMnya itu dari tiga aspek, kemampuan siswa, penguasaan materi dan kondisi sarana prasarana sekolah (PROCESS GPK, 07/08/2019).

**Peneliti:** Bagaimana proses penilaian untuk siswa inklusif?

**GPK:** Jadi begini Mas, semua rekaman proses pembelajaran, perkembangan kemampuan serta pencapaian siswa tercantum pada PPI. Nah untuk ujiannya, para GPK membuat soal ujian sendiri untuk siswa serta memberikan pendampingan kepada siswa tertentu yang punya keterbatasan atau ketidak mampuan dari segi fisik untuk mengerjakan soal ujian itu (PROCESS GPK, 07/08/2019). Selain dari PPI, nanti ada psikolog juga yang memberi penilaian, evaluasi serta saran kepada siswa dan nanti orang tua/wali murid diberikan penjelasan mengenai hasilnya yang nanti apakah anaknya bisa bersekolah dimana, kelemahan kelebihanannya apa, peningkatannya bagaimana dan seterusnya (PROCESS GPK, 07/08/2019).

**Peneliti:** Rapor siswa inklusif dan siswa reguler apakah ada perbedaan?

**GPK:** Untuk rapor pada dasarnya isinya sama Mas, cuma nanti pas bagian deskripsinya yang berbeda. Nanti ada deskripsi tambahan untuk siswa yang ABK dan biasanya langsung dijelaskan oleh GPKnya (PROCESS GPK, 07/08/2019).

**Peneliti:** Bagaimana dengan prestasi siswa inklusif?

**GPK:** Ada Mas. Ada yang juara lomba puisi, terus pas ada perlombaan Paralympic dan O2SN ada tiga anak yang juara. Laki-laki kelas 6 dia tuna grahita juara 1 tolak peluru. Terus, laki-laki kelas 5 dia tuna grahita juara 2 lompat jauh, ada yang perempuan kelas 4 dia tuna rungu dan wicara juara 2 tolak peluru (PRODUCT GPK, 28/8/2019).

**Peneliti:** Dari prestasi yang didapat oleh siswa tersebut, apakah ada perhatian khusus dari pemerintah seperti pemberian beasiswa dan semacamnya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya?

**GPK:** Saat ini belum ada Mas perhatian dari sekolah maupun pemerintah untuk memberi beasiswa atau kemudahan untuk mendaftar ke sekolah SMP atau jenjang selanjutnya dengan menggunakan prestasi siswa inklusif itu. Ya mereka cuma dikasih piagam, medali dan hadiah saja. Ya semoga ke depannya ada perhatian seperti itu (PRODUCT GPK, 28/8/2019).

## 8.2 Hasil Observasi

No	Aspek Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Aktifitas siswa selama proses pembelajaran di kelas:  a. Sesuai dengan tema yang dilaksanakan  b. Sesuai dengan bahan ajar yang tersedia.  c. Dapat diikuti oleh Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	O  O  O		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inisiatif guru dengan kreatifitasnya membuat media pembelajaran untuk membantu siswa ABK dalam proses belajar mengajar.</li> <li>• Guru membuat modul sebagai pembantu PBM siswa inklusif. Modul menyesuaikan dengan materi yang ada di K13.</li> <li>• Siswa ABK yang mengalami keterbatasan dalam penglihatan (<i>low vision</i>) diberikan bantuan kacamata berdasarkan usulan GPK kepada orang tua siswa ABK tersebut dengan saran dan perawatan dokter.</li> </ul>
2	Keterlibatan ABK dalam proses pembelajaran di	O		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa aktif mengikuti proses belajar mengajar,</li> </ul>

	kelas.			menjawab pertanyaan.
3	Sikap kerjasama ABK dan siswa lainnya dalam proses pembelajaran.	O		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meminjami alat tulis.</li> </ul>
4	Sikap toleransi antar siswa pada saat kegiatan di luar proses pembelajaran.	O		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada saat istirahat, siswa reguler mengajak bermain siswa yang ABK.</li> <li>• Bercanda dll.</li> <li>• Menolong mengambilkan alat tulis temannya ABK yang terjatuh.</li> </ul>
5	Fasilitas khusus untuk ABK: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. GPK</li> <li>b. Terapi khusus ABK</li> <li>c. Kamar mandi</li> <li>d. Ruang/kelas khusus ABK</li> </ul>	O O O O		<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPK tersedia namun belum ada yang lulusan pendidikan khusus.</li> <li>• Kamar mandi sudah tersedia dengan fasilitas untuk ABK atau disabilitas.</li> <li>• Ruang kelas inklusif mulai dari kelas 1-6 jadi satu ruangan (gedung). Namun, proses belajar mengajar tetap efektif.</li> <li>• Ruang terapi ada dengan fasilitas pendukung untuk anak ABK.</li> </ul>